

Katalog: 1399013.33

ISBN : 978-602-5419-93-5

Sparkline Charts

Line Chart

Easy Pie Charts

Bar Chart

Pie Chart

25%

50%

75%

100%

ANALISIS HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS PROVINSI JAWA TENGAH

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



ANALISIS HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS
PROVINSI JAWA TENGAH

2021

**Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS
Provinsi Jawa tengah
2021**

ISBN :

Nomor Publikasi : 33000. 2185

Katalog : 1399013.33

Ukuran Buku : 18,5 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 124 halaman

Naskah :

BPS Provinsi Jawa Tengah

Penyunting :

BPS Provinsi Jawa Tengah

Desain Kover :

BPS Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh :

© BPS Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

Pengarah : Ir. Adhi Wiriana M.Si.

Penanggung Jawab : Bob Setiabudi, S.Si, M.Si

Editor : Medha Wardhany SST, M.Si.

Penulis : Herry Kusmaiwanto

Desain Infografis : Mufti Ramadhan

<https://jsteng.bps.go.id>

Kata Pengantar

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul "Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021" sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Semarang, Desember 2021
Kepala BPS
Provinsi Jawa Tengah



Ir. Adhi Wiriana M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan Manfaat	4
1.3. Landasan Teori	5
1.3.1. Konsep dan Definisi.....	5
1.3.2. Pelayanan Statistik Terpadu	6
1.3.3. Kepuasan Layanan	7
1.4. Metodologi	9
1.4.1. Metode <i>Sampling</i>	9
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	10
1.4.3. Metode Analisis Data.....	10
1.5. Sistematika Penulisan	18
1.6. Realisasi Pengumpulan Data	19
1.6.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana PST.....	19
1.6.2. Target dan Realisasi Jumlah Responden SKD 2021	20
Bab 2 Segmentasi Konsumen.....	23
2.1. Gambaran Umum Konsumen	25
2.2. Konsumen Menurut Karakteristik.....	26
2.3. Konsumen Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan.....	29
2.4. Konsumen Menurut Jenis Layanan.....	30
2.5. Konsumen Menurut Fasilitas Utama untuk Memperoleh Layanan BPS ..	31
2.6. Konsumen menurut Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	32
Bab 3 Analisis Kepuasan Layanan	33
3.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan.....	35
3.2. Kepuasan Konsumen Terhadap Akses Data	36
3.3. Kepuasan Konsumen Terhadap Sarana dan Prasarana	36

3.4. <i>Gap Analysis</i> Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan BPS	37
3.5. <i>Importance and Performance Analysis</i> (IPA) Terhadap Pelayanan BPS.	39
3.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Pelayanan BPS.....	42
Bab 4 Analisis Persepsi Anti Korupsi	43
4.1. Penerapan Perilaku Anti Korupsi Pada Pelayanan BPS.....	45
4.2. Gap Analysis Kepuasan Konsumen dalam Penerapan Perilaku Anti Korupsi terhadap Pelayanan BPS.....	45
4.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap Pelayanan BPS.....	46
Bab 5 Analisis Kebutuhan Data.....	47
5.1. Kebutuhan Data Data Menurut Level Data.....	49
5.2. Kebutuhan Data Menurut Periode Data	50
5.3. Kebutuhan Data menurut Ragam Data	51
5.4. Kebutuhan Data menurut Sumber Data	52
Bab 6 Analisis Kepuasan Kualitas Data	53
6.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data BPS	55
6.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS.....	55
Bab 7 Penutup	57
7.1. Kesimpulan.....	59
7.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan	61
Lampiran.....	65

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Langkah-Langkah Penghitungan IKK	16
Tabel 1.2	Nilai Kinerja Unit Pelayanan	17
Tabel 3.1	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	38
Tabel 3.2	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Tingkat Penyesuaian Atribut Pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	39
Tabel 4.1	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan dan Gap Atribut di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	45
Tabel 4.2	Indeks Persepsi Anti Korupsi di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	46
Tabel 6.1	Tabel Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kelengkapan Data, Akurasi Data dan Kemutakhiran Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	55
Tabel 6.2	Tabel Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	56

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Diagram Cartesius Importance Analysis	13
Gambar 1.2	Persentase responden menurut metode pengumpulan	21
Gambar 2.1	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan DataBPS Sebagai Rujukan Utama	25
Gambar 2.2	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur	26
Gambar 2.3	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin	27
Gambar 2.4	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	27
Gambar 2.5	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Pekerjaan Utama	28
Gambar 2.6	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Instansi/Institusi	29
Gambar 2.7	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan	30
Gambar 2.8	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Layanan	30
Gambar 2.9	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Fasilitas Utama untuk Mendapatkan Layanan BPS	31
Gambar 2.10	Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan	32
Gambar 3.1	Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelayanan	35
Gambar 3.2	Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Terhadap Akses Data	36

Gambar 3.3	Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Terhadap Sarana Prasarana	36
Gambar 3.4	Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	37
Gambar 3.5	Importance and Performance Analysis (IPA) Pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	40
Gambar 3.6	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Pelayanan BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	42
Gambar 4.1	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Pelayanan BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah	46
Gambar 5.1	Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Level Data	50
Gambar 5.2	Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Periode Data	50
Gambar 5.3	Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Perolehannya	51
Gambar 5.4	Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Perolehannya	52
Gambar 5.1	Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Level Data	50

Lokus & Waktu

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di satuan kerja BPS Pusat, 34 BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota.

Juni - September 2021

Responden

Konsumen yang pernah menerima layanan dari unit PST BPS sejak:

1 Januari 2021 - akhir periode pencacahan

Survei Kebutuhan Data

Survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik

Kuesioner VKD20

(hardcopy & softcopy)

Pencacahan manual dengan *print out* kuesioner.

Pencacahan elektronik menggunakan sistem *online* e-mail, *online link* dan *online* PST.

Analisis

Analisis deskriptif

Analisis tabulasi silang (*cross tab analysis*)

Analisis kesenjangan (*gap analysis*)

Analisis kuadran (*Importance & performance analysis*)

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara berkesinambungan, sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan PST BPS melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Di sisi lain, BPS sebagai penyedia data statistik, perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan data konsumen serta kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS, sehingga BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD). Cakupan responden SKM dan SKD saling beririsan yaitu sama-sama pengguna data BPS,

sehingga pelaksanaan SKM diintegrasikan ke dalam SKD yang rutin dilaksanakan setiap tahun di seluruh PST BPS.

SKD merupakan survei yang diselenggarakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Sejarah pelaksanaan SKD dimulai tahun 2005 dimana survei ini pertama kali dilaksanakan dan hanya dilakukan di BPS Pusat. Tahun 2008 dilakukan *pilot project* atau uji coba dengan pelaksanaan SKD di BPS Pusat dan 5 (lima) BPS Provinsi. Secara bertahap dilakukan penambahan wilayah Provinsi sehingga di tahun 2009 dan 2010 SKD dilaksanakan di BPS Pusat dan 11 (sebelas) BPS Provinsi. Pelaksanaan SKD di BPS Pusat dan 33 BPS Provinsi dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya sejak tahun 2014 pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, sejak tahun 2019 pengumpulan data SKD dilaksanakan dengan metode CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*). Penggunaan metode ini semakin membantu pada pelaksanaan SKD tahun 2020 karena dimulainya kondisi adaptasi kebiasaan baru. Berkaitan dengan kondisi pandemi yang masih terjadi pada tahun 2021, maka pengumpulan data survei dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan metode *online*. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan serta penyesuaian pelaksanaan survei senantiasa dilakukan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Pelaksanaan SKD secara umum adalah untuk memperoleh bahan evaluasi dari konsumen sebagai bahan pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan yang baik.

Tujuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Tujuan pelaksanaan SKD dapat dijabarkan dalam rincian berikut:

1. Mengetahui jenis data yang dibutuhkan konsumen

2. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja BPS seluruh Indonesia
3. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS
4. Mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS
5. Mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS

1.3. Landasan Teori

1.3.1. Konsep dan Definisi

- a. Responden adalah objek SKD atau pemberi jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner SKD. Responden SKD 2021 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2021 sampai periode akhir pencacahan.
- b. Konsumen adalah pengguna data dan/atau pengguna layanan PST BPS yang menjadi responden SKD.
- c. Orang-data adalah pasangan satu-satu antara setiap konsumen dengan jenis data yang dibutuhkan.
- d. BPS adalah Badan Pusat Statistik, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- e. BPS Pusat adalah instansi vertikal BPS di pusat.
- f. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS di provinsi.
- g. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS di kabupaten/kota.
- h. Wilayah nasional adalah gabungan BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
- i. Wilayah PST atau unit PST adalah unit pelayanan statistik terpadu di BPS.
- j. Wilayah penyedia data adalah unit kerja BPS yang menerbitkan/menyediakan data.
- k. Ragam data adalah pengelompokan jenis data menurut kedeputian yang ada di BPS Pusat yang meliputi sosial, produksi, distribusi dan jasa,

neraca dan analisis statistik, metodologi dan informasi statistik, serta lainnya.

- l. Level data adalah tingkatan data berdasarkan wilayah yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, individu, dan lainnya.
- m. Periode data adalah rentang waktu suatu data dikumpulkan yang meliputi sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan, harian, dan lainnya

1.3.2. Pelayanan Statistik Terpadu

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan statistik dasar serta menjadi rujukan informasi bagi statistik secara keseluruhan. Hal ini menjadikan salah satu tugas dari BPS adalah menyediakan data dan informasi statistik secara menyeluruh. Hasil Kegiatan sensus dan survei yang dilaksanakan harus disampaikan kepada masyarakat, berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Penyebarluasan data BPS kepada masyarakat menjadi perhatian utama pihak luar, baik oleh instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, penyajian dan penyebarluasan data perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta kondisi yang terkini.

Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan pelayanan publik yang diberikan BPS yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan memadukan berbagai unit yang tersebar namun berhubungan satu dengan yang lain. Ragam layanan yang tersedia dalam PST adalah layanan perpustakaan, konsultasi, rekomendasi kegiatan statistik, dan penjualan publikasi/data mikro/peta digital.

Layanan di PST merupakan pintu gerbang penyebarluasan data BPS. Pelayanan yang diberikan melalui unit PST bersifat satu pintu atau disebut sebagai *one gate service*. Keberadaan unit PST diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mencari data dan informasi statistik. Sistem

layanan PST terbagi menjadi 2 (dua) yaitu konsumen datang langsung ke PST dan konsumen tanpa tatap muka dalam memperoleh pelayanan. Pelayanan tanpa tatap muka didapatkan melalui *website* BPS, aplikasi PST (pst.bps.go.id), aplikasi AllStat BPS (berbasis android dan iOS), telepon, faksimili, e-mail, maupun surat.

Dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, cakupan layanan PST yang harus menetapkan standar pelayanan antara lain:

- (1) Pelayanan Perpustakaan
- (2) Pelayanan Konsultasi Statistik melalui media datang langsung
- (3) Pelayanan Konsultasi Statistik melalui media online
- (4) Pelayanan Penjualan Publikasi melalui media datang langsung
- (5) Pelayanan Penjualan Publikasi melalui media online
- (6) Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui media datang langsung
- (7) Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui media online, dan
- (8) Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Berkenaan dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi serta terdapat tuntutan keterbukaan informasi publik seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, maka BPS selanjutnya melakukan upaya-upaya agar dapat memenuhi salah satu pasal yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Salah satu upaya tersebut adalah BPS melakukan penyediaan data yang mudah diperoleh melalui *website* BPS atau <https://www.bps.go.id>.

1.3.3. Kepuasan Layanan

Instansi penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan evaluasi mengenai kepuasan pelayanan menilai kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, unsur dalam menilai kepuasan meliputi hal-hal berikut:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dana atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Rincian biaya dapat diganti dalam bentuk pertanyaan yang lain jika dalam peraturannya biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen).

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain jika jenis layanan yang akan dilakukan penilaian berbasis website.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur perilaku dapat disesuaikan menjadi bentuk pertanyaan lain jika jenis layanan yang disurvei berbasis website.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

1.4. Metodologi

Metodologi yang akan dijabarkan dalam penjelasan berikut akan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu metode sampling, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

1.4.1. Metode Sampling

SKD 2021 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2021 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing wilayah PST BPS dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden serta pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung kepada responden dilakukan menggunakan moda PAPI (*Pencil and Paper Interview*), yaitu menggunakan kuesioner dalam bentuk *hardcopy*. Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, maupun operasional di lapangan. Sedangkan pengumpulan data secara mandiri oleh responden dilakukan dengan moda CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*), yaitu dalam jaringan/daring (*online*) melalui aplikasi berbasis *website*.

Penerapan metode pencacahan tersebut di setiap PST sebagai berikut:

- a. Di PST BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - Wawancara dikombinasikan dengan *self enumeration*, berlaku pada unit PST yang menerapkan layanan datang langsung/*offline*. Pada metode pencacahan ini dilakukan wawancara untuk pertanyaan di blok I, dan selanjutnya dilakukan pengisian secara *self enumeration* (khususnya yang terkait persepsi responden).
 - *Self-enumeration* atau swacacah oleh responden sepenuhnya dilakukan untuk pengisian kuesioner secara *online*. Pendataan dengan metode ini seluruh isian dalam kuesioner dilakukan pengisian mandiri oleh konsumen.
- b. Di PST BPS Pusat:
 - *Self-enumeration* secara *online*.

1.4.3. Metode Analisis Data

Analisis terhadap hasil Survei Kebutuhan Data 2021 dilakukan terhadap karakteristik konsumen, kepuasan konsumen terhadap pelayanan, persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Metode analisis yang digunakan

adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

Beberapa bentuk analisis deskriptif yang digunakan antara lain: analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (*gap analysis*), *Importance and Performance Analysis* (IPA), *Customer Satisfaction Index* (CSI) atau Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

a) Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisisnya tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami antara lain profil konsumen, kebutuhan dan ketersediaan data, maupun masalah lain.

b) Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan atau *gap analysis* adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) terhadap kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan harapan konsumen akan dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (*delivered*) oleh unit pelayanan. Nilai kesenjangan atau *gap* diperoleh dari selisih antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif maupun negatif. *Gap* positif akan diperoleh jika tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan, dimana semakin besar nilai *gap* maka konsumen semakin puas. Nilai *gap* negatif akan diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dibanding tingkat kepentingan, dimana semakin kecil nilai *gap* negatif konsumen semakin tidak puas.

c) *Importance and Performance Analysis (IPA)*

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (*quadrant analysis*). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan metode ini adalah untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan. IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Tingkat Kesesuaian

Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$TK = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \times 100\%$$

dengan:

TK = Tingkat kepuasan

\bar{x} = rata-rata tingkat kepuasan

\bar{y} = rata-rata tingkat kepentingan

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:

TK > 100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen

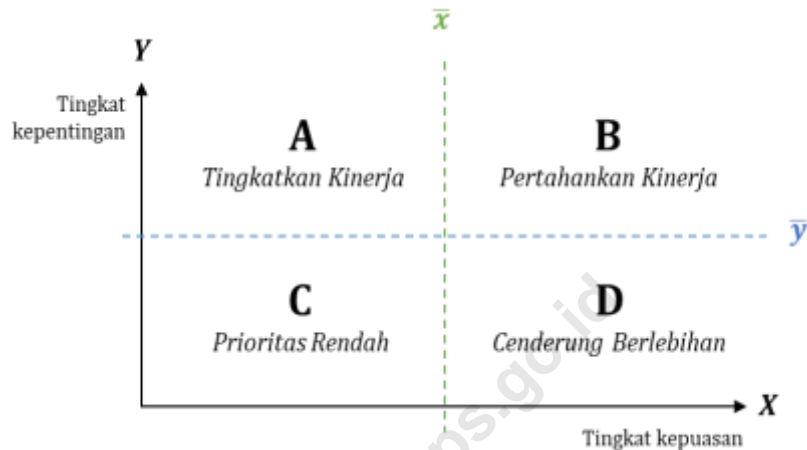
TK = 100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen

TK < 100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen

2. Diagram Cartesius

Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kepuasan (*performance*). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius

dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (\bar{x}, \bar{y}) dengan \bar{x} adalah rata-rata tingkat kepuasan dan \bar{y} adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Gambar 1.1. Diagram *Cartesius Importance and Performance Analysis*

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda, yaitu:

- **Kuadran A (*high importance and low performance*)**

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran “Tingkatkan Kinerja” yang mempunyai arti prioritas utama dari unit pelayanan ini adalah peningkatan kinerja (*performance improvement*). Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari harapan pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut.

Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Cara yang dapat dilakukan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja, sehingga

performance dari atribut pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

- **Kuadran B (*high importance and high performance*)**

Kuadran B atau Kuadran “Pertahankan Kinerja” terletak di sebelah kanan atas, yang memiliki arti bahwa kinerja sudah dapat memenuhi harapan pengguna layanan dan diusahakan untuk mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan, sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan.

- **Kuadran C (*low importance and low performance*)**

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran “Prioritas Rendah”. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan dan pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

- **Kuadran D**

Kuadran “Cenderung Berlebihan” terletak di sebelah kanan bawah mempunyai arti kinerja yang berlebihan sementara pengguna layanan menganggap kurang penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar satuan kerja pemilik indeks dapat melakukan penghematan sumber daya .

d) Persentase Konsumen yang Puas

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)

Indikator kepuasan konsumen selain indikator IKK juga disajikan dalam bentuk persentase konsumen yang puas. Indikator ini antara lain meliputi persentase konsumen yang puas terhadap kelengkapan data, akurasi data, kemutakhiran data, dan kualitas data. Persentase konsumen yang puas digunakan untuk menggambarkan berapa persen konsumen yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan BPS maupun data yang dihasilkan BPS terhadap seluruh konsumen yang mengisi SKD2021 pada periode pelaksanaan.

Skala pengukuran yang digunakan pada SKD 2021 adalah 1 - 10, dimana konsumen dikatakan puas jika menjawab nilai kepuasan diatas 7,66 yaitu merujuk pada pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Pedoman yang digunakan untuk menentukan kriteria kepuasan konsumen menggunakan nilai yang sama dengan penentuan kepuasan pada indeks kepuasan konsumen. Nilai kriteria yang digunakan sama dengan analisis SKD2020, sehingga untuk perbandingan dapat dilakukan pada kedua tahun tersebut.

e) Indeks Kepuasan Konsumen

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepuasan konsumen atas layanan yang diberikan oleh PST BPS dan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. Dengan demikian, ada 2 (dua) aspek IKK yang dihitung dalam SKD 2021 yaitu IKK terhadap kualitas pelayanan BPS dan IKK terhadap kualitas data BPS.

IKK terhadap kualitas pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 11 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD21. IKK terhadap kualitas data diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 3 aspek kualitas data, yaitu kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran data. Adapun langkah-langkah penghitungan IKK tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Langkah-Langkah Penghitungan IKK

Langkah	IKK Kualitas Pelayanan	IKK Kualitas Data
<p>1. Menghitung Penimbang</p>	<p>Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan. Rumus penimbang:</p> $w_i = \frac{\bar{y}_i}{\sum_{i=1}^{11} \bar{y}_i}$ <p>dengan: w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{11} w_i = 1$ \bar{y}_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i $i = 1, 2, \dots, 11$</p>	<p>Tingkat kepentingan terhadap masing-masing aspek kualitas data diasumsikan sama, yaitu skala maksimum penilaian sebesar 10. Oleh karena itu, nilai penimbang pada IKK kualitas data menjadi konstan, yaitu</p> $w = \frac{y}{\sum_{i=1}^3 \bar{y}_i} = \frac{10}{30}$ <p>dengan</p> $\sum_{i=1}^3 w_i = 1$
<p>2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')</p>	<p>IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 11 atribut pelayanan. Rumus IKK':</p> $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{11} w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{11} w_i} = \sum_{i=1}^{11} w_i \bar{x}_i$ <p>dengan: \bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i</p>	<p>IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 3 aspek kualitas data. Rumus IKK':</p> $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^3 w \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^3 w_i} = \sum_{i=1}^3 \frac{10}{30} \bar{x}_i$ <p>dengan: \bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan aspek kualitas data ke-i</p>
<p>3. Menghitung IKK</p>	<p>Penghitungan IKK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:</p> $IKK = \frac{IKK'}{\text{skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$ <p>Nilai IKK diklasifikasikan menjadi 4 kategori seperti pada Tabel 1.2.</p>	

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dikategorikan dalam 4 kategori seperti tabel berikut.

Tabel 1.2 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	Tidak baik
65,00 - 76,60	Kurang baik
76,61 - 88,30	Baik
88,31 - 100,00	Sangat Baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

f) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi di PST BPS. Aspek penghitungan terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 4 (empat) atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD21.

Langkah-langkah penghitungan IPAK adalah sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

$$\text{Rumus penimbang: } w_i = \frac{\bar{y}_i}{\sum_{i=1}^4 \bar{y}_i} \times 100\%$$

dengan:

$$w_i = \text{penimbang atribut pelayanan ke-}i, \sum_{i=1}^4 w_i = 1$$

$$\bar{y}_i = \text{rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-}i$$

$$i = 1,2,3,4$$

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 4 (empat) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK' :

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^4 w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^4 w_i} = \sum_{i=1}^4 w_i \bar{x}_i$$

dengan:

\bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{\text{skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 10 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

1.5. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, landasan teori, metodologi, sistematika penulisan, serta realisasi pengumpulan data SKD2021.

Bab 2 Segmentasi Konsumen, berisi analisis mengenai karakteristik konsumen di PST BPS Pusat yang menjadi responden SKD 2021 berdasarkan Blok I VKD21.

Bab 3 Analisis Kepuasan Layanan, berisi analisis mengenai kepuasan terhadap layanan di PST BPS Puast berdasarkan Blok II VKD21.

Bab 4 Analisis Perilaku Anti Korupsi, berisi analisis mengenai persepsi terhadap perilaku anti korupsi pada layanan di PST BPS Pusat berdasarkan Blok II VKD21.

Bab 5 Analisis Kebutuhan Data, berisi analisis mengenai data di PST BPS Pusat yang dibutuhkan oleh konsumen berdasarkan Blok III VKD21.

Bab 6 Analisis Kepuasan Kualitas Data, berisi analisis mengenai kepuasan terhadap kualitas data di PST BPS Pusat yang didapatkan oleh konsumen berdasarkan Blok III VKD21.

Bab 7 Penutup, berisi kesimpulan hasil SKD 2021 serta saran terhadap pelaksanaan SKD 2022 serta rekomendasi perbaikan pelayanan di PST BPS Pusat.

1.6. Realisasi Pengumpulan Data

SKD 2021 dilaksanakan di 515 wilayah PST yang terdiri dari PST BPS Pusat, 34 PST BPS Provinsi, serta 480 PST BPS Kabupaten/Kota.

1.6.1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana PST

Direktorat Diseminasi Statistik selaku unit yang diberikan tugas untuk mengelola PST di BPS Pusat senantiasa melakukan pembinaan pengembangan secara berkesinambungan. Pembinaan yang dilakukan misalnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, sampai dengan pengembangan aplikasi PST. Kiat-kiat tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan data dan informasi statistik pada unit PST.

Identifikasi sarana dan prasarana di unit PST BPS Pusat, meliputi: (1) Informasi pelayanan, (2) Maklumat pelayanan, (3) *Wifi*, (4) Petugas pelayanan, (5) Ruang pelayanan, (6) Komputer, dan (7) Sarana Pengaduan. Kesemua komponen sarana dan prasarana tersebut dapat dipenuhi oleh PST di BPS Pusat, yang mengindikasikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik dalam pelayanan. Selain tersedianya sarana prasarana tersebut PST BPS pusat melakukan adaptasi dengan kondisi baru, dengan melakukan pengembangan

untuk pelayanan yang dilakukan secara *online*. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi serta sarana pendukung, pelayanan tanpa tatap muka langsung terus di kembangkan di PST.

1.6.2. Target dan Realisasi Jumlah Responden SKD 2021

Masing-masing PST BPS memiliki target jumlah responden yang harus dipenuhi pada pelaksanaan SKD 2021. Pada PST BPS Kabupaten/Kota ditargetkan memperoleh sebanyak 30 responden, dan untuk PST BPS Provinsi target jumlah responden adalah 70 responden. Target jumlah responden yang paling tinggi adalah PST BPS Pusat dimana memiliki jumlah target 150 responden.

Pelaksanaan SKD 2021 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah sebesar 18.227 responden dari total target responden sebanyak 17.200. Hal ini menunjukkan pencapaian realisasi adalah sebesar 105,97 persen untuk seluruh PST penyelenggara SKD 2021. Pencapaian target pengumpulan SKD 2021 secara keseluruhan terpenuhi baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten Kota, dimana minimal responden yang diperoleh adalah sesuai dengan target yang ditetapkan.

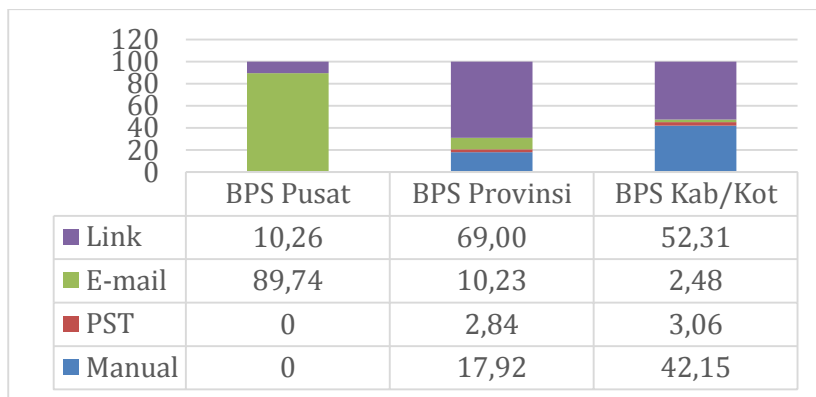
Berdasarkan metode pengumpulan data pada seluruh PST penyelenggara SKD metode CAWI lebih banyak digunakan, pada seluruh penyelenggara PST. Hal ini terkait dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru yang diantaranya termasuk pemberian pelayanan secara *daring* atau *online*. Secara rinci pengumpulan SKD terbagi menjadi 4 metode, yaitu:

1. Wawancara kepada responden yang datang untuk kemudian dilakukan input oleh petugas (atau disebut manual).
2. Responden yang datang langsung melakukan pengisian mandiri pada *device* atau komputer yang tersedia di masing-masing PST (atau disebut PST).

3. Responden yang mengisi survei secara mandiri melalui *link* pengisian yang dikirimkan melalui *e-mail* (atau disebut *e-mail*).
4. Responden yang mengisi survei secara mandiri melalui *link* yang ditujukan kepada publik, baik melalui link yang didapatkan dari *website* maupun media lain (selanjutnya disebut *link*).

Metode pengumpulan SKD 2021 secara nasional didominasi dengan metode *link* atau sebesar 54,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan data melalui CAWI sudah mulai familiar digunakan mengingat tingginya persentase responden yang mengisi melalui metode ini. Meskipun demikian metode pengentrian secara manual masih banyak digunakan yaitu sebanyak 38,28 persen. Metode ini dilaksanakan salah satunya pada PST yang masih melakukan pelayanan secara *offline*, serta pada wilayah yang mempunyai kendala terkait jaringan maupun sinyal jika dilakukan secara CAWI.

Jika dilihat berdasarkan wilayah PST penyelenggara SKD, untuk BPS Pusat dikarenakan selama periode pencacahan tidak terdapat pelayanan secara online, semua responden melaksanakan survei secara mandiri dan *online* baik mengisi melalui *e-mail* yang dikirimkan maupun *link* yang diperoleh dari *website* maupun lainnya. Responden yang mengisi melalui *e-mail* yang dikirimkan adalah sebanyak 89,74 persen dan responden yang mengisi melalui *online link* adalah sebesar 10,26 persen. Hal tersebut tidak sejalan jika dibandingkan dengan metode pengumpulan untuk PST BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dimana responden yang mengisi melalui *online link* merupakan metode paling banyak digunakan atau secara berturut-turut sebesar 69,00 persen dan 52,31 persen.



Gambar 1.2. Persentase responden menurut metode pengumpulan data

<https://jateng.bps.go.id>

SEGMENTASI

KONSUMEN

Bab 2

Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah
di dominasi oleh ...



Perempuan
65,28 %



Kurang dari atau
sama dengan SLTA
/ Sederajat
43,06 %



Berprofesi Pelajar
/ Mahasiswa
50,00 %

Sebagian besar menggunakan ...



Akses Produk
Statistik pada
website BPS
58,17 %



Website BPS
Provinsi Jawa
Tengah
60,19 %

Data BPS untuk
Perencanaan,
monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
Nasional
100,00 %

BAB 2

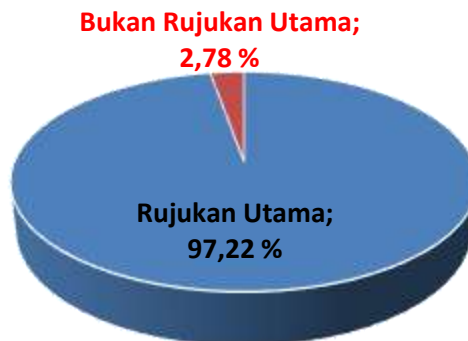
Segmentasi Konsumen

Bab ini menjabarkan analisis mengenai segmentasi konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Segmentasi tersebut meliputi karakteristik konsumen dan penggunaan layanan BPS Provinsi Jawa Tengah oleh konsumen. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

2.1. Gambaran Umum Konsumen

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS, baik yang diperoleh dari sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi, sangat diminati oleh para konsumen. Data dan informasi tersebut dimanfaatkan oleh konsumen untuk berbagai kebutuhan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPS dalam menyajikan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Kecenderungan konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan data BPS sebagai rujukan utama terlihat pada Gambar 2.1. Sebagian besar konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 97,22 persen.



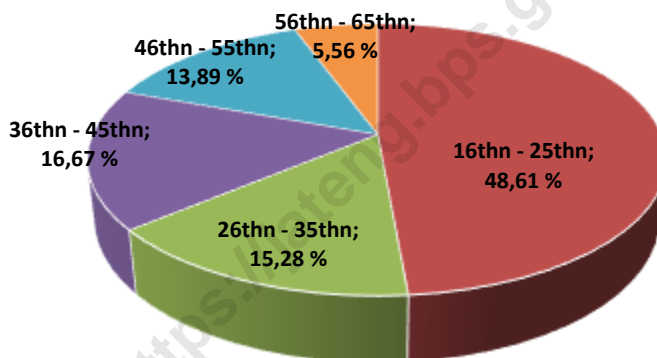
Gambar 2.1. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang Menggunakan Data BPS Sebagai Rujukan Utama

2.2. Konsumen Menurut Karakteristik

Pada bagian ini, dibahas mengenai segmentasi konsumen menurut karakteristiknya. Karakteristik konsumen yang dianalisis dibagi menjadi lima, yaitu kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditamatkan, pekerjaan utama, dan instansi/institusi.

Kelompok Umur

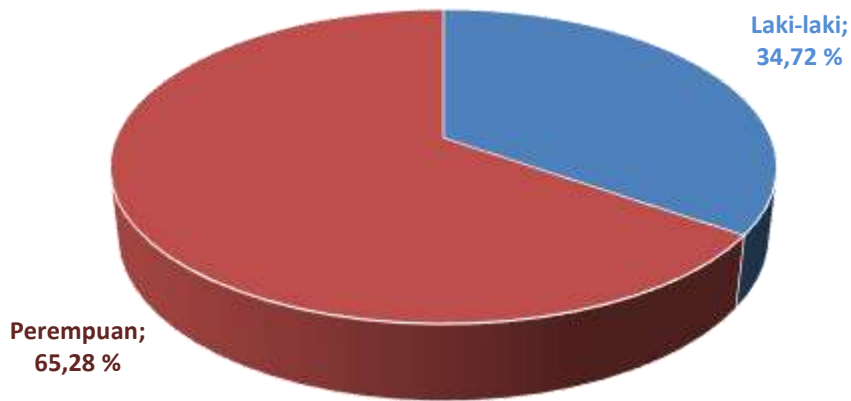
Berdasarkan Gambar 2.2, konsumen data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) hampir separuh adalah kelompok usia pelajar dan mahasiswa (16-25 tahun) sebanyak 48,61persen. Dan 31,95 persen kelompok usia pekerja muda (26-45 tahun).



Gambar 2.2. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur

Jenis Kelamin

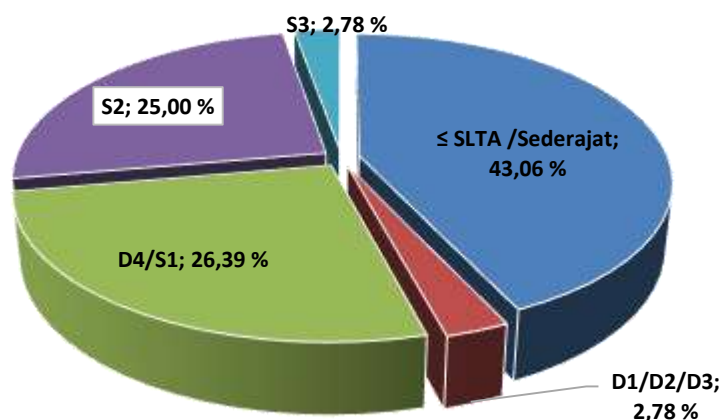
Persentase konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah menurut jenis kelamin, konsumen perempuan sedikit lebih banyak dibanding konsumen laki-laki. Ini ditunjukkan pada Gambar 2.3 dengan persentase perempuan sebanyak 65,28 persen dan persentase laki-laki sebanyak 34,72 persen



Gambar 2.3. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Karakteristik konsumen menurut tingkat pendidikan penting diketahui. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, konsumen akan semakin melek data. Pada SKD 2021, karakteristik konsumen menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dikelompokkan menjadi lima, yaitu \leq SLTA/ sederajat, D1/D2/D3, D4/S1, S2, dan S3. Berdasarkan Gambar 2.4, konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh konsumen dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat (43,06 persen) dan tingkat pendidikan D4/S1 (26,39 persen).

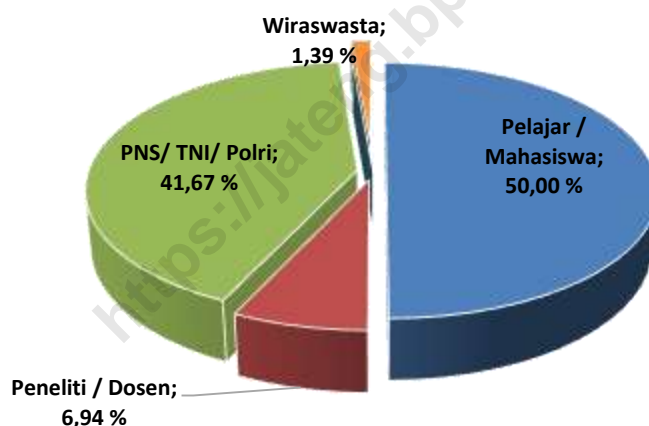


Gambar 2.4. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pekerjaan Utama

Pada SKD 2021, pekerjaan utama dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, PNS/TNI/Polri, pegawai BUMN/D, pegawai swasta, wiraswasta, dan lainnya. Pekerjaan utama yang dicakup dalam SKD 2020 adalah pekerjaan utama konsumen pada saat pencacahan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil kunjungan yang dilakukan oleh konsumen tersebut.

Berdasarkan Gambar 2.5, sebagian besar konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah pelajar/mahasiswa (50 persen). Sekitar 41,67 persen konsumen data sebagai pegawai (PNS/TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai BUMN/D). Baru 6,94 persen Peneliti/Dosen dan pelaku usaha yang memanfaatkan data BPS sebagai rujukan.

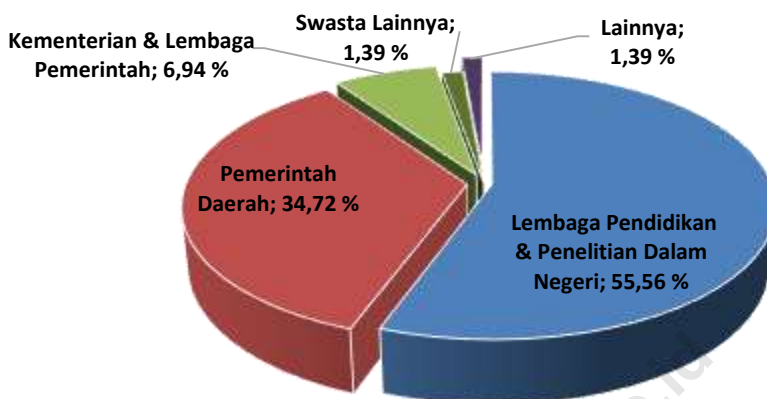


Gambar 2.5. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Pekerjaan Utama

Instansi/Institusi

Konsumen pada SKD 2021 dapat dipilah menurut instansi/institusi tempat pekerjaan utama. Pada Gambar 2.6, sebagian besar konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah berasal dari Lembaga Pendidikan dan Penelitian Dalam Negeri (55,56 persen). Konsumen pemerintah daerah sebanyak 34,72 persen, konsumen yang bekerja di Kementerian dan Lembaga Pemerintah sebesar 6,94

persen. Sementara itu yang bekerja di Institusi Swasta lainnya sebesar 1,39 persen.



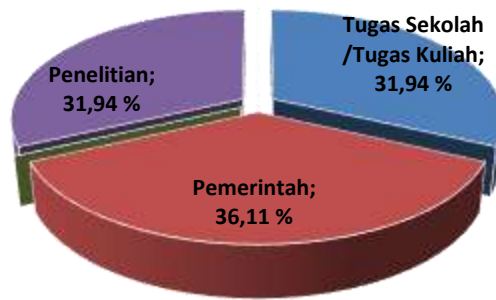
Gambar 2.6. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Instansi/Institusi

2.3. Konsumen Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan

Pemanfaatan utama hasil kunjungan ke PST BPS Provinsi Jawa Tengah menggambarkan tujuan utama pencarian atau konsultasi data yang dilakukan oleh konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Dalam SKD 2021, pemanfaatan utama dikelompokkan menjadi lima, yaitu Tugas Sekolah/Tugas Kuliah, Pemerintahan, Penelitian, Komersial, dan Lainnya.

Sebagaimana terdapat pada Gambar 2.7, hasil SKD 2021 menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil kunjungan, baik kunjungan langsung maupun tidak langsung, ke PST BPS Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi. Data BPS dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk evaluasi, monitoring, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah sebesar 36,11 persen, dan sebanyak 31,94 dimanfaatkan dalam hal penelitian dan demikian juga sebanyak 31,94 persen untuk membuat tugas sekolah/kuliah dan penelitian.

Tidak terdapat pemanfaatan Hasil kunjungan dalam bidang komersial ke PST BPS Provinsi Jawa Tengah demikian juga untuk pemanfaatan lainnya.

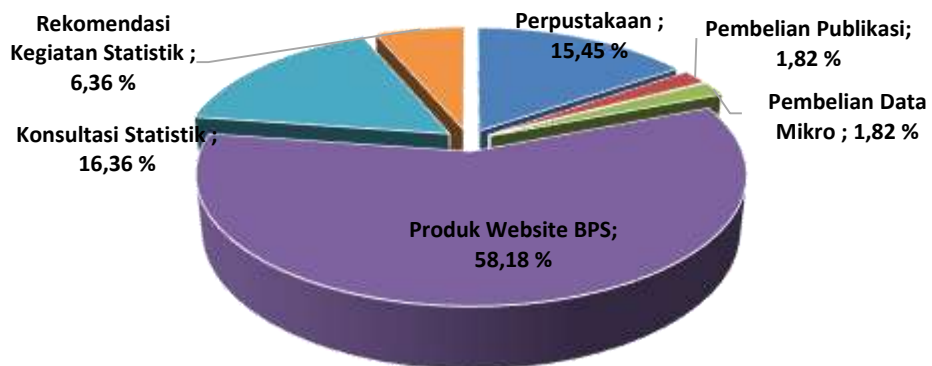


Gambar 2.7. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan

2.4. Konsumen Menurut Jenis Layanan

Sesuai peran BPS sebagai lembaga publik, BPS menyediakan berbagai jenis layanan data dan konsultasi statistik. Layanan tersebut meliputi Pustaka Tercetak, Pustaka Digital, Penjualan Publikasi, Data Mikro, Konsultasi Data Statistik, dan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Distribusi jenis layanan di PST BPS BPS Provinsi Jawa Tengah terlihat pada Gambar 2.8. Berdasarkan gambar tersebut, jenis layanan paling banyak digunakan adalah Produk Website sebesar 58,18 persen. Layanan konsultasi data statistik sebesar 16,36 persen. Layanan Perpustakaan sebesar 15,45 persen, adapun 6,36 persen Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik serta untuk Pembelian Publikasi dan Pembelian Data Mikro masing masing 1,82 persen.

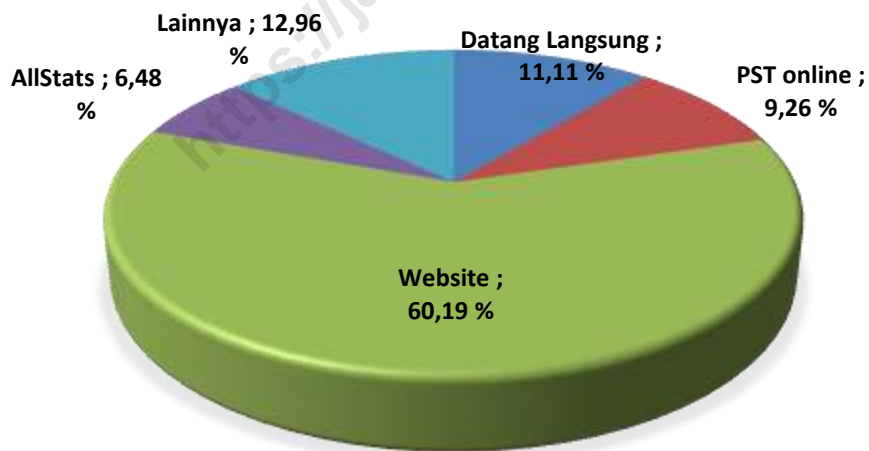


Gambar 2.8. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Layanan

2.5. Konsumen Menurut Fasilitas Utama untuk Memperoleh Layanan BPS

Fasilitas utama yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS juga ditanyakan kepada konsumen yang menjadi responden SKD 2020. Fasilitas tersebut meliputi Website BPS, Allstat BPS (aplikasi android dan iOS), Romantik Online (romantik.bps.go.id), Sirusa (sirusa.bps.go.id), Silastik (silastik.bps.go.id), telepon/faksimili, e- mail/surat, datang langsung ke PST, dan lainnya.

Berdasarkan Gambar 2.9, dapat dilihat bahwa sebagian besar konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah mendapatkan data melalui fasilitas Website BPS dengan persentase sebesar 60,19 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang tersedia pada website BPS sudah cukup memenuhi kebutuhan data konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Walaupun demikian, masih ada konsumen yang datang langsung ke PST BPS sebesar 11,11 persen. Sementara itu, fasilitas yang paling sedikit digunakan oleh konsumen untuk memperoleh data BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah melalui AllstatsBPS dengan persentase 6,48 persen.



Gambar 2.9. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Fasilitas Utama untuk Mendapatkan Layanan BPS

2.6. Konsumen menurut Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

Sejalan visi BPS 2020-2024, “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, BPS menyediakan data statistik untuk mendukung Indonesia Maju, baik tahap perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan. Merujuk pada gambar 2.6. konsumen yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga/OPD (K/L/OPD) sebesar 34,72 persen dan 6,94 persen. Berdasarkan hasil SKD 2021, terlihat pada Gambar 2.10 keseluruhan konsumen yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan sebagai rujukan utama. Oleh karena itu, data yang disediakan oleh BPS harus mempunyai keakuratan dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.



Gambar 2.10. Persentase Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan

ANALISIS KEPUASAN

LAYANAN

Bab 3

Gambaran tingkat kepuasan
konsumen terhadap pelayanan di
PST BPS Provinsi Jawa Tengah

IKK Pelayanan 94,22 %

Indeks Kepuasan Konsumen
terhadap Kualitas Pelayanan
PST BPS Provinsi Jawa
Tengah termasuk Sangat baik
(skala 100)

Persentase konsumen
yang puas terhadap
Pelayanan PST

100,00 %

Persentase
konsumen yang
puas terhadap
Sarana
Prasarana

100,00 %

Persentase
konsumen yang
puas terhadap
Akses Data

100,00 %

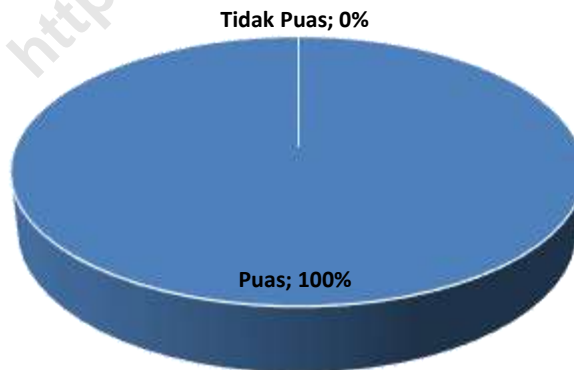
BAB 3

Analisis Kepuasan Layanan

Bab ini menjabarkan analisis mengenai kepuasan konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah secara umum dan menurut atribut pelayanan. Analisis kepuasan layanan meliputi kepuasan konsumen terhadap pelayanan, akses, dan sarana prasarana, *gap analysis, Importance and Performance Analysis* (IPA), serta analisis Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

3.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan

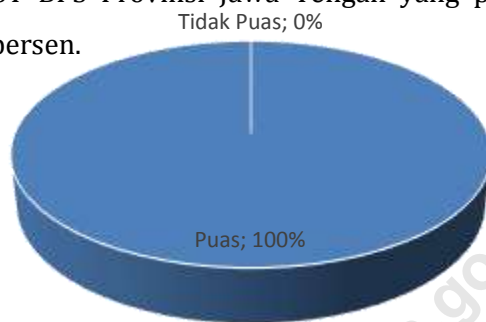
Keberhasilan pelayanan BPS dapat diukur dengan persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS. Berdasarkan Gambar 3.1, persentase konsumen yang merasa puas dengan pelayanan BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah sebesar 100,00 persen.



Gambar 3.1. Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelayanan

3.2. Kepuasan Konsumen Terhadap Akses Data

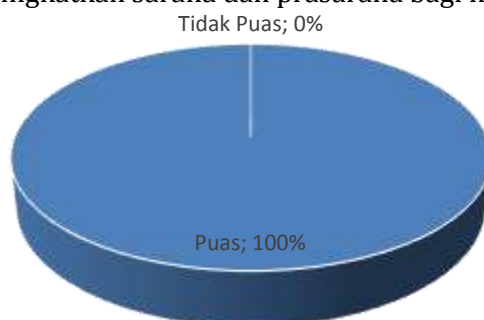
Kepuasan konsumen terhadap akses data BPS diperoleh dari atribut akses data BPS melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11), akses data pada Website BPS. Berdasarkan Gambar 3.2 persentase konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang puas terhadap akses data sebesar 100,00 persen.



Gambar 3.2. Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Terhadap Akses Data

3.3. Kepuasan Konsumen Terhadap Sarana dan Prasarana

Kepuasan konsumen terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS dapat diperoleh dari atribut kenyamanan sarana dan prasarana serta keberadaan fasilitas pengaduan. Berdasarkan Gambar 3.3, persentase konsumen di PST BPS BPS Provinsi Jawa Tengah yang puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 100,00 persen. Masih ada “pekerjaan rumah” bagi PST BPS Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sarana dan prasarana bagi konsumen data.

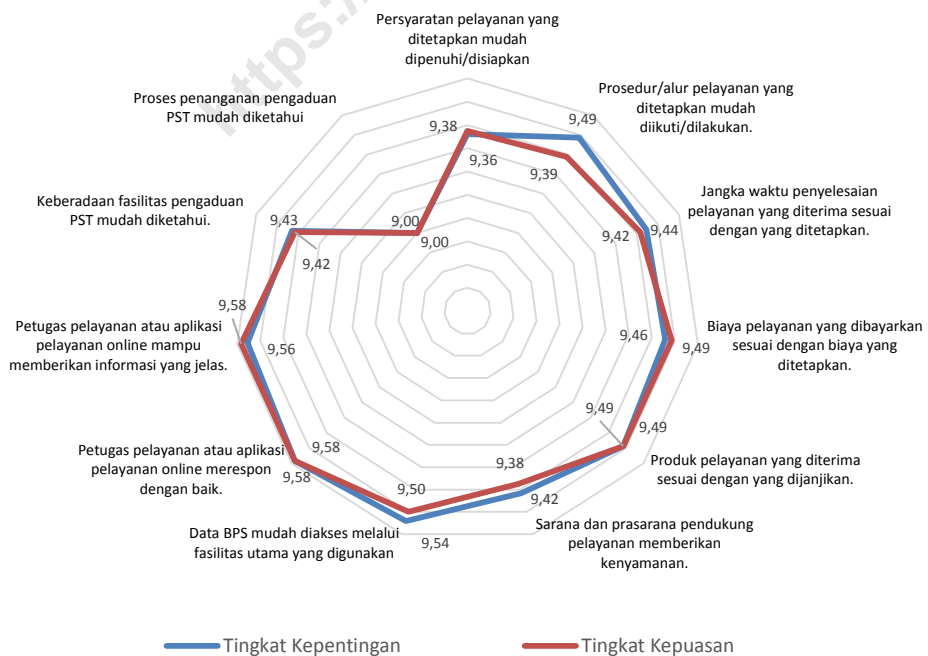


Gambar 3.3. Persentase Kepuasan Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Terhadap Sarana Prasarana

3.4. Gap Analysis Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan BPS

Kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS tergantung pada kepentingan pelayanan BPS bagi konsumen tersebut. Artinya, seberapa penting suatu pelayanan bagi konsumen akan berpengaruh pada seberapa puas konsumen terhadap kualitas pelayanan tersebut. Pada bagian ini, akan dianalisis mengenai tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS dengan menggunakan gap analysis s. Konsumen yang dicakup dalam analisis ini adalah konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang memberikan penilaian puas dan sangat puas terhadap pelayanan BPS.

Gap analysis dapat menggambarkan kesenjangan antara harapan konsumen dengan kinerja pelayanan BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Dalam gap analysis, upaya perbaikan kinerja pelayanan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan.



Gambar 3.4. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

Gap masing-masing atribut pelayanan dapat dilihat dalam Tabel 3.4. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah memiliki gap -0,10 sampai 0,03. Berdasarkan tabel tersebut, atribut Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan memiliki nilai gap paling jauh yaitu -0,10. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerjanya paling rendah dalam memenuhi harapan konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, ada 3 atribut dengan gap paling sesuai yakni Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan; Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik; serta Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui (0,00).

Tabel 3.1. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

No	Atribut Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	Gap
1	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan	9,36	9,38	0,01
2	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	9,49	9,39	-0,10
3	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	9,44	9,42	-0,03
4	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	9,46	9,49	0,03
5	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	9,49	9,49	0,00
6	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	9,42	9,38	-0,04
7	Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan	9,54	9,50	-0,04
8	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	9,58	9,58	0,00

9	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	9,56	9,58	0,03
10	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.	9,43	9,42	-0,01
11	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui	9,00	9,00	0,00

Terlihat beberapa atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai gap negatif, ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah masih ada yang belum memenuhi harapan konsumen.

1. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan. -0.10
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan. -0.03
3. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan. -0.04
4. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan -0.04
5. Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. -0.01

3.5. *Importance and Performance Analysis (IPA) Terhadap Pelayanan BPS*

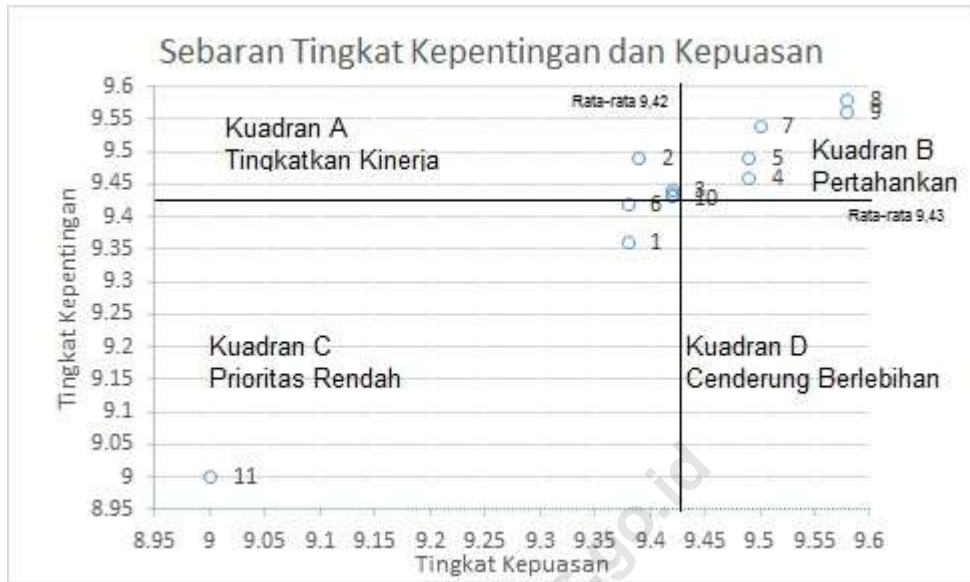
Bagian ini menganalisis kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS dalam rangka menentukan prioritas perbaikan kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. IPA menganalisis tingkat kesesuaian dengan membandingkan tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan. Selanjutnya, IPA memetakan atribut pelayanan ke dalam empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X.

Tabel 3.2. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Tingkat Penyesuaian Atribut Pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

No	Atribut Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	Tingkat Kesesuaian (%)
1	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan	9,36	9,38	100,21

2	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	9,49	9,39	98,95
3	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	9,44	9,42	99,79
4	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	9,46	9,49	100,32
5	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	9,49	9,49	100,00
6	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	9,42	9,38	99,58
7	Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan	9,54	9,50	99,58
8	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	9,58	9,58	100,00
9	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	9,56	9,58	100,21
10	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.	9,43	9,42	99,89
11	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui	9,00	9,00	100,00

Tabel 3.2. menjelaskan tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan dari responden menurut atribut pelayanan. Tingkat kesesuaian paling tinggi ialah Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan (100,32 persen), sedangkan atribut Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan memiliki tingkat kesesuaian paling rendah (98,95 persen).



Gambar 3.5. Importance and Performance Analysis (IPA) Pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan

1. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan
2. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan
3. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan yang diterima
4. Biaya pelayanan yang dibayarkan, sesuai dengan biaya yang ditetapkan
5. Produk pelayanan yang diterima, sesuai dengan yang dijanjikan
6. Sarana prasarana pelayanan memberikan kenyamanan
7. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan
8. Petugas pelayanan/aplikasi pelayanan *online* merespon dengan baik
9. Petugas pelayanan/aplikasi pelayanan *online* mampu memberikan informasi yang jelas
10. Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui
11. Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit

Kuadran A memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan lebih dari rata-rata harapan tetapi nilai kinerja kurang dari rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Berdasarkan Gambar 3.5, atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama perbaikan oleh PST BPS adalah Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan, Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan dan Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui.

Kuadran B memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja lebih dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran B sudah dapat memenuhi harapan pengguna sehingga perlu dipertahankan kinerjanya. Berdasarkan Gambar 3.5, atribut pelayanan yang perlu dipertahankan kinerjanya oleh PST BPS adalah:

1. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan
2. Produk pelayanan yang diterima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan
4. Petugas pelayanan/aplikasi pelayanan online merespon dengan baik
5. Petugas pelayanan/aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas

Kuadran C memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja di bawah rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran C perlu diperbaiki namun prioritasnya lebih rendah dibandingkan atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan Gambar 3.5, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah oleh PST BPS adalah:

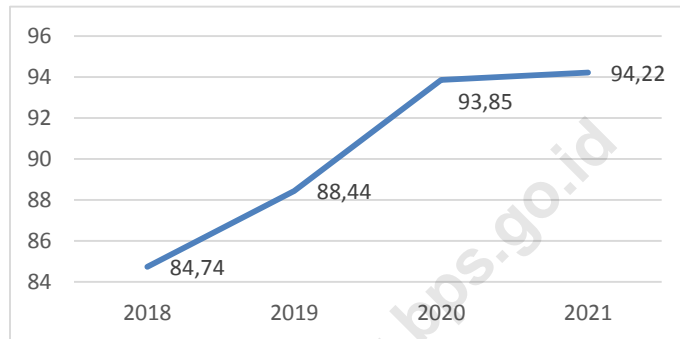
1. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan
2. Sarana prasarana pelayanan memberikan kenyamanan
3. Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit

Kuadran D memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan di bawah rata-rata harapan tetapi kinerja di atas rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Berdasarkan Gambar 3.6, atribut pelayanan PST BPS tidak ada yang termasuk dalam kuadran D.

3.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Pelayanan BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/*Customer Satisfaction Index(CSI)* digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap

pelayanan yang diberikan oleh BPS. Nilai IKK untuk PST BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 94,22, yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah masuk kategori Sangat Baik. Berdasarkan Gambar 3.6, IKK BPS mengalami kenaikan 0,37 dari 93,85 pada tahun 2020 menjadi 94,22 pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah semakin puas dengan pelayanan yang diberikan.



Gambar 3.6. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah

INDEKS PERSEPSI

ANTI KORUPSI

Bab 4

IPAK

97,22 %

corruption

**Perilaku anti korupsi
sangat diterapkan dalam
pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah**

Bab 4

Analisis Perilaku Anti Korupsi

Pada bab ini diuraikan analisis mengenai persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Analisis persepsi anti korupsi meliputi penerapan perilaku anti korupsi dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

4.1. Penerapan Perilaku Anti Korupsi Pada Pelayanan BPS

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang dipakai untuk mendapatkan gambaran persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan BPS. Indikator IPAK menggunakan tingkat kepentingan konsumen sebagai penimbang antar atribut yang menjadi proxy dari perilaku anti korupsi.

4.2. Gap Analysis Kepuasan Konsumen dalam Penerapan Perilaku Anti Korupsi terhadap Pelayanan BPS

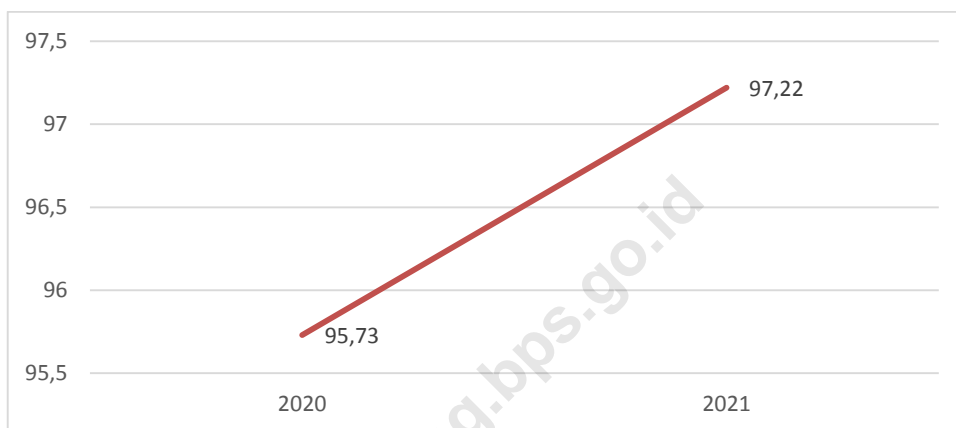
Gap atribut Penerapan Perilaku Anti Korupsi terhadap Pelayanan BPS dalam Tabel 4.1. memiliki nilai NEGATIF yang mengindikasikan harapan konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dari kinerja yang telah diberikan oleh Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan.

Tabel 4.1. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Atribut Pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

No	Atribut Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan	Gap
1	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	9,7361	9,7222	- 0,0139
2	Tidak ada penerimaan imbalan diluar ketentuan dalam pelayanan.	9, 7361	9,7222	- 0,0139
3	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	9,7639	9,7500	- 0,0139
4	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	9,7778	9,6944	- 0,0833

4.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap Pelayanan BPS

Nilai IPAK PST BPS Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil SKD 2021 sebesar 95,73 naik 1,49 jika dibandingkan dengan hasil SKD 2021 yang berarti bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 4.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Pelayanan BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

Berikut table Nilai IPAK PST BPS Provinsi Jawa Tengah selama dua tahun terakhir, yang menunjukkan perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah.

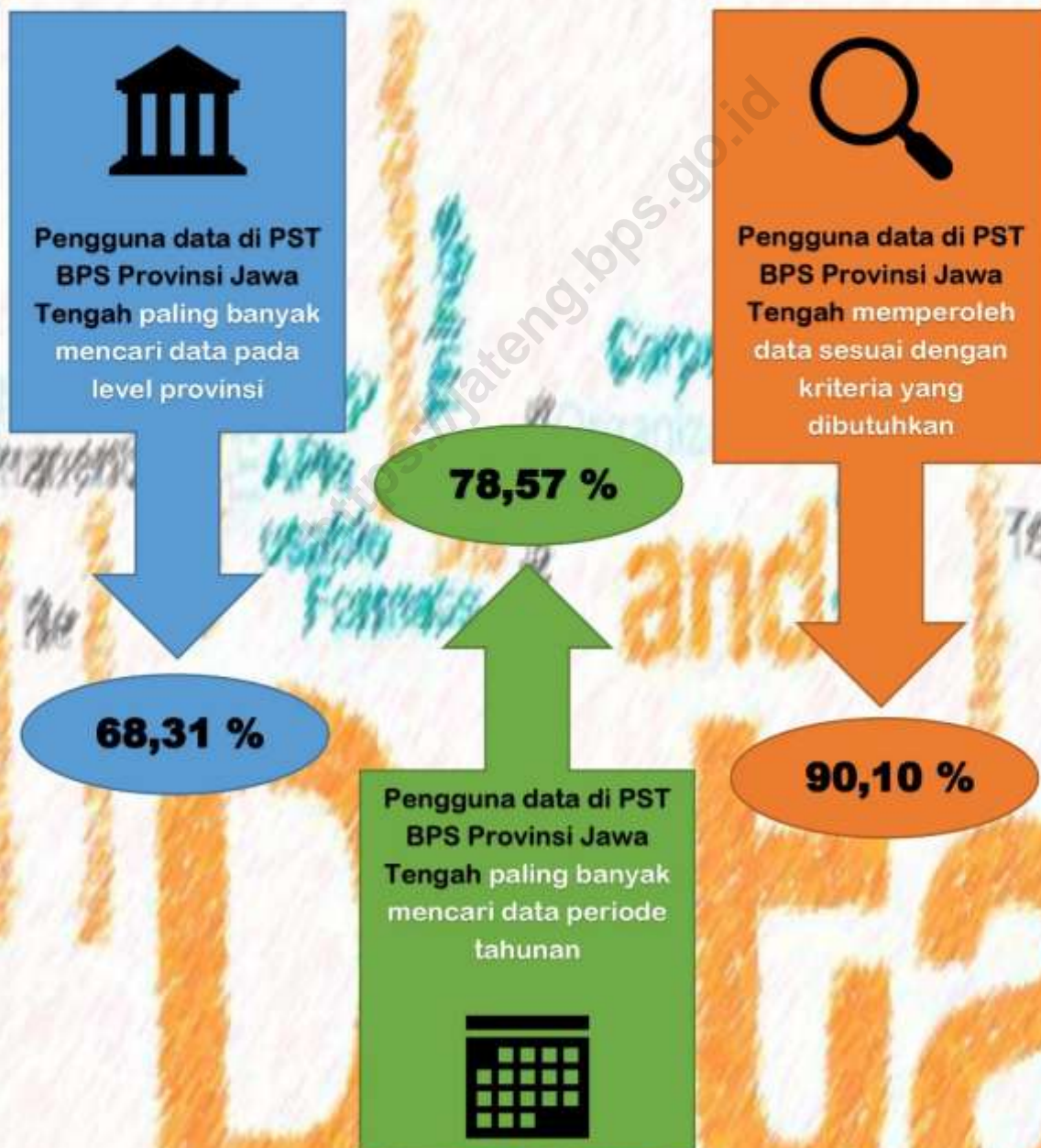
Tabel 4.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

No	Lokus dan tahun Indeks Persepsi Anti Korupsi	IPAK
1	PST BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	95,73
2	PST BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	97,22

ANALISIS

KEBUTUHAN DATA

Bab 5



Bab 5

Analisis Kebutuhan Data

SKD 2021, selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan PST BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data serta mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. Pada bab ini akan menjabarkan analisis mengenai kebutuhan data dari konsumen. Analisis tersebut meliputi kebutuhan data menurut jenis data, level data, periode data, dan perolehan data.

Terdapat dua pendekatan kewilayahan yang digunakan dalam bab ini, yaitu wilayah PST BPS Provinsi Jawa Tengah dan wilayah penyedia data BPS Provinsi Jawa Tengah. Wilayah PST BPS Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk menganalisis jenis, level, dan periode dari data yang dicari oleh konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, wilayah penyedia data BPS Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk menganalisis perolehan konsumen terhadap data yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang-data.

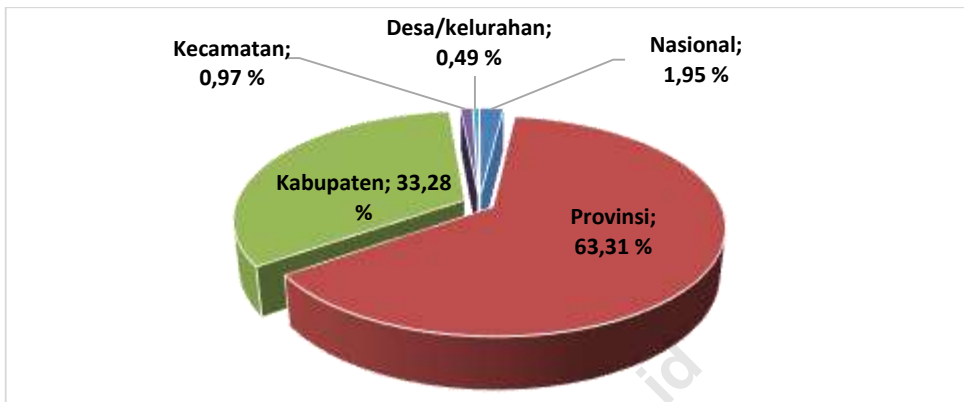
Orang-data adalah pasangan satu-satu antara setiap konsumen (orang) dengan jenis data yang dicari (data). Misalnya, seorang pengguna data mencari lima jenis data, maka dihitung lima orang-data.

Ketika mencari data, konsumen bisa mencari lebih dari satu *series* data untuk jenis data yang sama. Sehingga, jika konsumen mencari satu jenis data sebanyak sepuluh tahun, orang tersebut akan dihitung sebagai satu konsumen dan sepuluh orang-data.

5.1. Kebutuhan Data Data Menurut Level Data

Dari hasil SKD 2021, dapat diidentifikasi tingkat penyajian data (level data) yang dibutuhkan oleh konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah . Secara umum, dari 616 orang-data, 63,31 persen mencari data pada level provinsi, data level kabupaten/kota (33,28 persen). Level data dengan pencarian paling sedikit

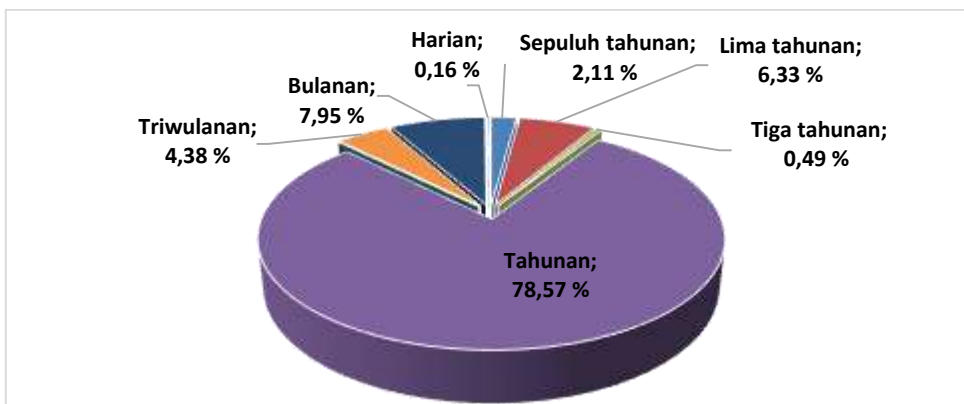
adalah data level Desa/Kelurahan (0,49 persen). Adapun sebaran pencarian data menurut level data secara lengkap ditunjukkan dalam Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Level Data

5.2. Kebutuhan Data Menurut Periode Data

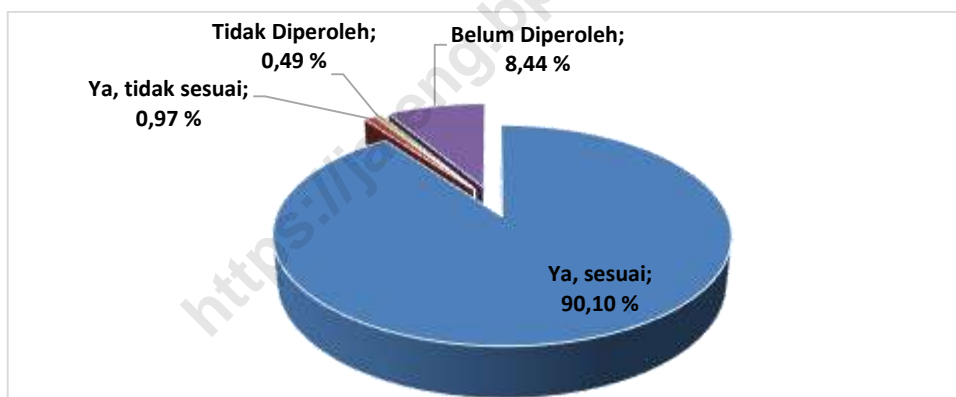
Periode data dalam SKD terdiri dari periode data sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan, harian, dan lainnya. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa data periode tahunan merupakan data yang paling banyak dicari dengan persentase mencapai 78,57 persen. Sementara itu, data dengan pencarian yang terendah menurut periode adalah data periode harian, yaitu 0,16 persen.



Gambar 5.2. Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Periode Data

5.3. Kebutuhan Data menurut Ragam Data

Dalam pencarian data, konsumen tidak selalu memperoleh data yang dicari. SKD 2021 membagi jenis perolehan data menjadi empat, yaitu diperoleh dan sesuai, diperoleh tapi tidak sesuai, tidak diperoleh, dan belum diperoleh. Jenis perolehan diperoleh dan sesuai memiliki arti bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan konsumen, sedangkan diperoleh tapi tidak sesuai berarti data yang diperoleh hanya memenuhi sebagian kebutuhan konsumen atau menjadi pengganti data yang sebenarnya dibutuhkan konsumen. Jenis perolehan tidak diperoleh berarti bahwa data yang dicari benar-benar tidak diperoleh. Sementara itu, belum diperoleh memiliki makna bahwa pencarian data belum selesai dilakukan sehingga data yang dibutuhkan belum diperoleh. Analisis berikut menjelaskan jenis perolehan data BPS di Provinsi Jawa Tengah.

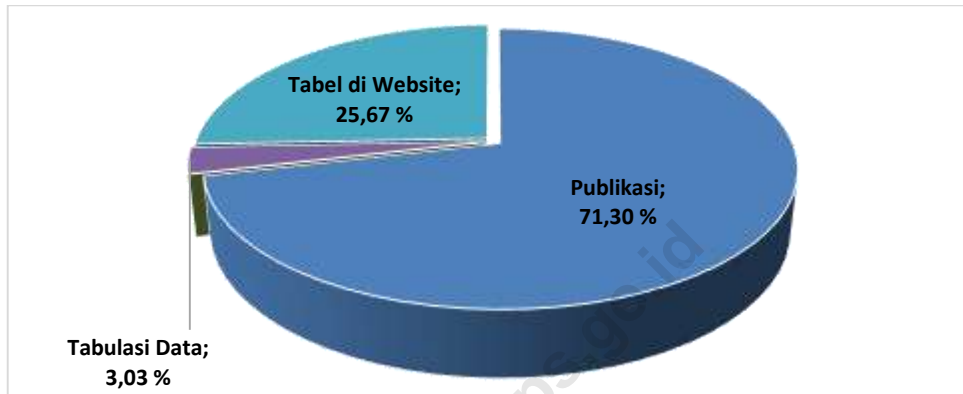


Gambar 5.3. Persentase Pencarian Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Perolehannya

Berdasarkan Gambar 5.3, sebanyak 90,10 persen telah memperoleh data sesuai yang dengan kriteria yang dibutuhkan, sejumlah kecil diperoleh tetapi tidak sesuai dan tidak diperoleh masing - masing sebesar 0,97 persen dan 0,49 persen. Sedangkan sebanyak 8,44 persen tidak bisa memperoleh data yang dicari.

5.4. Kebutuhan Data menurut Sumber Data

Jenis sumber Data adalah sumber perolehan data yang dibutuhkan/dikonsultasikan responden, dengan sumber data terdiri atas : 1. Publikasi; 2. Data Mikro; 3. Peta; 4. Tabulasi Data dan; 5. Tabel di Website.



Gambar 5.4. Persentase Pencarian Data Menurut Jenis Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Perolehannya

Pada gambar 5.4, sebanyak 71,30 persen berupa publikasi terbitan Badan Pusat Statistik, dengan sebanyak 25,76 persen bersumber dari Tabel di Website, untuk Tabulasi sebanyak 3,03 persen, sedang Data Mikro dan Peta tidak ada konsumen yang mencari data tersebut

ANALISIS KEPUASAN

KUALITAS DATA

Bab 6

Kualitas Data PST BPS
Provinsi Jawa Tengah
termasuk sangat baik
(skala 100)

Kepuasan Konsumen
Terhadap Kualitas
Data BPS masuk
dalam kategori sangat
baik (skala 100)



IKK
Kualitas
Data
92,03%



Kualitas
Data Secara
Umum

91,03%

Kelengkapan
Data

90,37%

Akurasi Data

91,98%

Kemutakhiran
Data

89,84%

Bab 6

Analisis Kepuasan Kualitas Data

Bab ini menjabarkan analisis mengenai kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan informasi statistik yang diperoleh dari penyedia data BPS Provinsi Jawa Tengah. Analisis tersebut meliputi kepuasan konsumen terhadap kualitas data secara umum serta menurut dimensi kualitas data. Selain itu, analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap kualitas data BPS. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang-data.

6.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data BPS

Tabel 6.1. Tabel Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kelengkapan Data, Akurasi Data dan Kemutakhiran Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah,

Item IKK Kualitas Data	Orang Data		Persentase Orang Data	
	Tidak Puas $\leq 7,66$	Puas $> 7,66$	Tidak Puas $\leq 7,66$	Puas $> 7,66$
Kelengkapan Data	54	507	9,63	90,37
Akurasi Data	45	516	8,02	91,98
Kemutakhiran Data	57	504	10,16	89,84

6.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS

Indek Kepuasan Konsumen (IKK) Kualitas Data adalah indikator untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang diberikan oleh BPS. IKK Kualitas Data diukur melalui 3 aspek kualitas data yaitu kelengkapan, akurasi, kemutakhiran, dan kualitas.

Pada Skala kepuasan 1 sampai dengan 10, dengan konsumen dikatakan puas apabila tingkat kepuasan yang diberikan bernilai > 7,66.

- Kelengkapan data berarti data yang dihasilkan BPS lengkap dari aspek cakupan wilayah dan tahun data
- Akurasi data berarti data yang dihasilkan BPS mampu mengukur kondisi yang sebenarnya.
- Kemutakhiran data berarti data yang dihasilkan BPS up to date mampu menggambarkan kondisi/fenomena yang terjadi saat ini

Tabel 6.2. Tabel Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

Total Record	Item	IKK per Item
115	Kelengkapan Data	3,0841
	Akurasi Data	3,0638
	Kemutakhiran Data	3,0551
	Total	9,2029

Didapat Nilai IKK = Total IKK per Item X 10 = **92,03**

Hasil penghitungan IKK diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu:

1. Nilai IKK 25,00-64,99 : Kualitas data tidak baik
2. Nilai IKK 65,00-76,60 : Kualitas data kurang baik
3. Nilai IKK 76,61-88,30 : Kualitas data baik
4. Nilai IKK 88,31-100,00 : Kualitas data sangat baik.

Dengan demikian Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS masuk dalam kategori kualitas data sangat baik.

Kepuasan Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

IKK Pelayanan adalah Gambaran Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah

**IKK Pelayanan
94,22 %**

IKK Kualitas Data adalah Gambaran Tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas Data BPS Provinsi Jawa Tengah

**IKK Kualitas Data
92,03 %**

Indek Kepuasan Konsumen

Semakin tinggi nilai IKK, maka konsumen semakin puas dengan pelayanan yang diberikan

Persentase konsumen menggunakan data BPS untuk perencanaan & MONEV

100,00%

100 %

Konsumen puas dengan Sarana Prasarana

Indeks Persepsi Anti Korupsi

97,22 %

Bab 7 Penutup

7.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Survei Kebutuhan Data (SKD) bertujuan untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan pelayanan PST BPS. SKD 2021 diselenggarakan di 515 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Cakupan responden SKD 2021 adalah konsumen yang pernah menerima layanan dari PST BPS Provinsi Jawa Tengah selama 1 Januari 2021 sampai dengan akhir periode pencacahan.

Realisasi jumlah responden SKD 2021 di BPS Provinsi Jawa Tengah sebesar 72 responden. Pengumpulan data SKD 2021 di PST BPS Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam kurun waktu Juni-September 2021 oleh responden dengan mengisi kuesioner sendiri (self enumeration) melalui pencacahan manual.

Hasil SKD 2021 dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS.

Publikasi ini menyajikan analisis hasil SKD 2021 di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan SKD 2021 di PST BPS Provinsi Jawa Tengah secara umum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi pengumpulan data di PST Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah, yang digambarkan melalui responden SKD, didominasi oleh konsumen yang berasal dari lembaga pendidikan dan penelitian dalam negeri (55,56 persen) dengan pemanfaatan data terbesar digunakan untuk tugas sekolah/tugas kuliah (31,94 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen berasal dari akademisi. Hal

tersebut diperkuat dengan persentase pekerjaan utama konsumen terbesar adalah pelajar/mahasiswa (50 persen).

2. Konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah cenderung menggunakan layanan yang menyediakan data dan informasi statistik dalam bentuk digital atau softcopy. Hal tersebut ditunjukkan dengan jenis layanan yang paling sering digunakan oleh konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah akses produk statistik pada website (58,18 persen). Kecenderungan tersebut juga diperkuat dengan persentase fasilitas utama untuk memperoleh data BPS terbesar adalah website BPS (60,19 persen).
3. Sebagian besar konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah menggunakan data BPS sebagai data utama untuk kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, BPS menjadi rujukan utama bagi konsumen dalam memperoleh data. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase penggunaan data BPS sebagai rujukan utama sebesar 97,22 persen.
4. Sebagian besar konsumen merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 100,00 persen. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa nilai gap positif dan negatif, dimana ada nilai persepsi (kepuasan) lebih tinggi dari nilai harapan (kepentingan) demikian pula sebaliknya. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah memiliki gap -0,01 sampai 0,03. Sehingga, dapat dikatakan bahwa bahwa beberapa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan untuk memenuhi harapan konsumen.
5. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah digambarkan melalui IKK terhadap Pelayanan PST BPS. Nilai IKK terhadap Pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah 94,22. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah masuk kategori sangat baik.
6. Kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi di PST BPS Provinsi Jawa Tengah digambarkan melalui IPAK. Nilai IPAK PST BPS Provinsi Jawa Tengah

adalah 97,22. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah.

7. Level dan periode data yang dicari oleh konsumen di PST BPS Provinsi Jawa Tengah sangat beragam. Level provinsi merupakan level data yang paling banyak dicari oleh konsumen (63,31 persen). Sementara itu, periode tahunan merupakan periode data yang paling banyak dicari oleh konsumen (78,57 persen).
8. Secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Provinsi Jawa Tengah dengan ditunjukkan persentase konsumen yang puas terhadap kualitas data BPS sebesar 92,03 persen. Disamping itu, persentase konsumen puas terhadap data juga disajikan menurut dimensi kualitas data, yaitu kelengkapan data, akurasi data, dan ketepatan waktu data. Sebanyak 90,37 persen konsumen merasa puas dengan kelengkapan data, 91,98 persen konsumen merasa puas dengan akurasi data, serta 89,84 persen konsumen merasa puas dengan ketepatan waktu data.
9. Kepuasan konsumen terhadap kualitas data digambarkan dengan IKK terhadap Kualitas Data. Nilai IKK terhadap Kualitas Data untuk penyedia data BPS Provinsi Jawa Tengah adalah 92,03. Artinya, kualitas data dari penyedia BPS Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori sangat baik.

7.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan

Berdasarkan hasil SKD 2021, saran dan rekomendasi yang bisa diberikan kepada unit pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah perbaikan yang terbagi dalam tiga bagian yaitu Prioritas Utama, Prioritas Rendah dan Pertahankan, dengan rincian sebagai berikut :

Prioritas Utama

Terdiri atas beberapa atribut sebagai berikut

1. Kemudahan Prosedur

- a. Memastikan poster alur pelayanan PST terpasang di PST BPS Provinsi Jawa Tengah pada tempat yang mudah terlihat oleh calon pengguna layanan.
 - b. Memutar berbagai informasi terkait PST dengan menggunakan slideshow disertai narasi suara pada Media TV yang tersedia, sehingga pengguna layanan yang tidak sempat melihat/membaca poster/leaflet alur pelayanan di ruang PST bisa mengetahui adanya Alur Layanan, Visi Misi, Maklumat, Standar Layanan dan Standar Biaya yang ada.
 - c. Tersedianya area informasi dan petugas yang selalu siap membantu memberikan informasi yang dibutuhkan.
 - d. Memperkuat publisitas alur pelayanan melalui media online (website, media sosial, whatsapp group).
 - e. Memperbarui informasi terkait layanan secara berkala, baik di ruang PST maupun pada media online.
2. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian
- a. Berupaya memenuhi timeline yang telah ditetapkan dan melakukan peninjauan kembali timeline pelayanan publik yang telah di terapkan.
 - b. Menyediakan SDM berkompeten untuk dapat menghandle layanan agar sesuai dengan standar waktu layanan yang telah ditetapkan.
 - c. Mempublikasikan Standar Layanan baik di ruang PST maupun media online agar pengguna layanan mengetahui kesesuaian jangka waktu penyelesaian layanan per jenis layanan yang diberikan.
 - d. Memasang range waktu layanan pada sistem antrian, sebagai informasi berapa lama konsumen di layani oleh petugas.
 - e. Memperbarui informasi terkait standar layanan termasuk jangka waktu penyelesaian layanan secara berkala.

Prioritas Rendah

Terdiri atas beberapa atribut sebagai berikut

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan

- a. Untuk memudahkan konsumen dalam mengetahui persyaratan untuk mendapatkan layanan, maka PST BPS Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan persyaratan pelayanan melalui berbagai media, baik media offline (banner di ruang PST) maupun media online (terpasang pada website maupun medsos).
 - b. Perlu di rancang sebuah inovasi seperti e-tiket dengan atau android gadget untuk mempermudah konsumen dalam mengakses data BPS.
 - c. Perlu di rancang database konsumen, sehingga konsumen yang sudah pernah mengakses data BPS di PST BPS Provinsi Jawa Tengah hanya perlu menyampaikan kode unik NIP.
2. Sarana Prasarana
- a. Melengkapi sarana dan prasarana yang wajib tersedia sebagai penunjang dalam rangka memberikan pelayanan prima.
 - b. Memastikan sarana dan prasarana yang tersedia bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya
 - c. Melakukan evaluasi amatan sarana dan prasarana yang tersedia, apakah sudah sesuai dan memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan
3. Kemudahan Fasilitas Pengaduan
- a. Lebih mensosialisasikan Layanan Pengaduan yang tersedia di PST BPS Provinsi Jawa Tengah melalui banner di Ruang PST maupun media online.
 - b. Memperkuat publisitas terkait Aplikasi Pengaduan yang telah terpasang pada website BPS Provinsi Jateng, Medsos maupun Ruang PST.
4. Kemudahan Proses Penanganan pengaduan
- a. Meningkatkan kecepatan respon terhadap Pengaduan (complain).
 - b. Menyusun dokumentasi terkait pengaduan yang masuk.
 - c. Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh konsumen sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - d. Melakukan evaluasi dan analisis layanan terhadap pengaduan yang diterima.

<https://jateng.bps.go.id>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Kelompok Umur

Wilayah PST BPS	Kelompok Umur						
	< 16thn	16thn - 25thn	26thn - 35thn	36thn - 45thn	46thn - 55thn	56thn - 65thn	> 65thn
JAWA TENGAH	0,00	48,61	15,28	16,67	13,89	5,56	0,00
CILACAP	0,00	41,94	16,13	22,58	16,13	3,23	0,00
BANYUMAS	0,00	42,86	8,57	22,86	25,71	0,00	0,00
PURBALINGGA	0,00	25,81	22,58	29,03	19,35	3,23	0,00
BANJARNEGARA	0,00	23,53	14,71	35,29	26,47	0,00	0,00
KEBUMEN	0,00	10,53	18,42	36,84	21,05	13,16	0,00
PURWOREJO	0,00	18,18	30,30	21,21	21,21	9,09	0,00
WONOSOBO	0,00	37,50	9,38	37,50	15,63	0,00	0,00
MAGELANG	0,00	33,33	21,21	24,24	18,18	3,03	0,00
BOYOLALI	0,00	27,27	27,27	15,15	24,24	6,06	0,00
KLATEN	0,00	50,00	13,33	16,67	16,67	3,33	0,00
SUKOHARJO	0,00	18,92	29,73	35,14	16,22	0,00	0,00
WONOGIRI	0,00	30,00	20,00	30,00	20,00	0,00	0,00
KARANGANYAR	0,00	33,33	20,00	30,00	10,00	6,67	0,00
SRAGEN	0,00	48,39	12,90	29,03	6,45	3,23	0,00
GROBOGAN	0,00	25,00	12,50	34,38	25,00	0,00	3,13
BLORA	0,00	22,50	35,00	32,50	5,00	5,00	0,00
REMBANG	0,00	25,00	12,50	34,38	21,88	6,25	0,00
PATI	0,00	12,50	34,38	21,88	28,13	3,13	0,00
KUDUS	0,00	16,22	18,92	27,03	29,73	8,11	0,00
JEPARA	0,00	43,75	15,63	28,13	9,38	3,13	0,00
DEMAK	0,00	22,58	12,90	32,26	25,81	6,45	0,00
SEMARANG	0,00	40,00	20,00	20,00	16,67	3,33	0,00
TEMANGGUNG	0,00	36,36	18,18	27,27	18,18	0,00	0,00
KENDAL	0,00	27,27	27,27	21,21	24,24	0,00	0,00
BATANG	0,00	33,33	16,67	26,67	16,67	6,67	0,00
PEKALONGAN	0,00	24,24	9,09	42,42	18,18	6,06	0,00
PEMALANG	0,00	18,75	25,00	21,88	34,38	0,00	0,00
TEGAL	0,00	19,44	30,56	27,78	19,44	2,78	0,00
BREBES	0,00	32,26	19,35	45,16	3,23	0,00	0,00
KOTA MAGELANG	0,00	43,75	6,25	21,88	28,13	0,00	0,00
KOTA SURAKARTA	0,00	10,81	18,92	29,73	40,54	0,00	0,00
KOTA SALATIGA	0,00	46,88	3,13	28,13	21,88	0,00	0,00
KOTA SEMARANG	0,00	38,89	16,67	22,22	19,44	2,78	0,00
KOTA PEKALONGAN	0,00	50,00	9,38	21,88	15,63	3,13	0,00
KOTA TEGAL	0,00	18,75	18,75	40,63	18,75	3,13	0,00

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Kelompok Umur
Konsep	:	Kelompok Umur
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen menurut kelompok umur terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p_i = Persentase Konsumen dengan kelompok umur ke-i x_i = Jumlah konsumen dengan kelompok umur ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1 (< 16 \text{ th}), 2 (16 - 25 \text{ th}), 3 (26 - 35 \text{ th}), 4 (36 - 45 \text{ th}), 5 (46 - 55 \text{ th}), 6 (56 - 65 \text{ th}), 7 (> 65 \text{ th})$
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan kelompok umur tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	:	1. Wilayah PST BPS
Penyajian	:	2. Kelompok Umur
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Lampiran 2. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin

Wilayah PST BPS	Jenis Kelamin	
	Laki Laki	Perempuan
JAWA TENGAH	34,72	65,28
CILACAP	51,61	48,39
BANYUMAS	48,57	51,43
PURBALINGGA	74,19	25,81
BANJARNEGARA	41,18	58,82
KEBUMEN	60,53	39,47
PURWOREJO	51,52	48,48
WONOSOBO	50,00	50,00
MAGELANG	42,42	57,58
BOYOLALI	48,48	51,52
KLATEN	36,67	63,33
SUKOHARJO	40,54	59,46
WONOGIRI	46,67	53,33
KARANGANYAR	50,00	50,00
SRAGEN	54,84	45,16
GROBOGAN	46,88	53,13
BLORA	25,00	75,00
REMBANG	62,50	37,50
PATI	59,38	40,63
KUDUS	54,05	45,95
JEPARA	50,00	50,00
DEMAK	48,39	51,61
SEMARANG	33,33	66,67
TEMANGGUNG	54,55	45,45
KENDAL	45,45	54,55
BATANG	56,67	43,33
PEKALONGAN	51,52	48,48
PEMALANG	46,88	53,13
TEGAL	66,67	33,33
BREBES	54,84	45,16
KOTA MAGELANG	37,50	62,50
KOTA SURAKARTA	37,84	62,16
KOTA SALATIGA	50,00	50,00
KOTA SEMARANG	36,11	63,89
KOTA PEKALONGAN	40,63	59,38
KOTA TEGAL	62,50	37,50

<https://jateng.bps.go.id>

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin
Konsep	: Segmentasi konsumen
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen laki-laki/perempuan terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD di wilayah PST BPS tertentu.
Klasifikasi Penyajian	: 1. Wilayah PST BPS 2. Jenis Kelamin
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen
Rumus	: $P_i = \frac{x_i}{y} \times 100\%$
Penghitungan	Dengan: P_i = Persentase konsumen dengan jenis kelamin ke-i x_i = Jumlah konsumen dengan jenis kelamin ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1$ (laki-laki), 2 (perempuan)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan jenis kelamin tersebut di wilayah PST BPS tertentu.
Manfaat	: Mendapatkan gambaran segmentasi konsumen menurut jenis kelamin.

Lampiran 3. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Wilayah PST BPS	Tingkat Pendidikan				
	Kurang dari atau sama dengan SLTA/Sederajat	D1/D2/D3	D4/S1	S2	S3
JAWA TENGAH	43,06	2,78	26,39	25,00	2,78
CILACAP	41,94	3,23	45,16	6,45	3,23
BANYUMAS	51,43	2,86	17,14	22,86	5,71
PURBALINGGA	35,48	3,23	58,06	3,23	0,00
BANJARNEGARA	26,47	2,94	50,00	17,65	2,94
KEBUMEN	23,68	2,63	44,74	26,32	2,63
PURWOREJO	24,24	3,03	60,61	12,12	0,00
WONOSOBO	46,88	6,25	18,75	28,13	0,00
MAGELANG	33,33	6,06	30,30	30,30	0,00
BOYOLALI	21,21	12,12	30,30	36,36	0,00
KLATEN	56,67	3,33	23,33	16,67	0,00
SUKOHARJO	21,62	13,51	54,05	10,81	0,00
WONOGIRI	23,33	6,67	56,67	13,33	0,00
KARANGANYAR	26,67	6,67	56,67	10,00	0,00
SRAGEN	54,84	9,68	25,81	9,68	0,00
GROBOGAN	31,25	12,50	50,00	6,25	0,00
BLORA	52,50	12,50	27,50	7,50	0,00
REMBANG	25,00	0,00	40,63	28,13	6,25
PATI	9,38	6,25	75,00	9,38	0,00
KUDUS	24,32	2,70	59,46	13,51	0,00
JEPARA	43,75	12,50	40,63	3,13	0,00
DEMAK	35,48	3,23	38,71	22,58	0,00
SEMARANG	53,33	0,00	33,33	13,33	0,00
TEMANGGUNG	45,45	6,06	36,36	12,12	0,00
KENDAL	21,21	3,03	30,30	45,45	0,00
BATANG	40,00	16,67	36,67	6,67	0,00
PEKALONGAN	33,33	9,09	51,52	6,06	0,00
PEMALANG	25,00	3,13	59,38	12,50	0,00
TEGAL	19,44	5,56	61,11	13,89	0,00
BREBES	29,03	6,45	58,06	6,45	0,00
KOTA MAGELANG	43,75	3,13	43,75	9,38	0,00
KOTA SURAKARTA	5,41	10,81	51,35	29,73	2,70
KOTA SALATIGA	43,75	3,13	37,50	15,63	0,00
KOTA SEMARANG	41,67	0,00	22,22	27,78	8,33
KOTA PEKALONGAN	46,88	3,13	46,88	3,13	0,00
KOTA TEGAL	21,88	3,13	40,63	34,38	0,00

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: pi = Persentase konsumen dengan tingkat pendidikan ke-i xi = Jumlah konsumen dengan tingkat pendidikan ke-i y = Jumlah seluruh konsumen i= 1 (\leq SMA), 2 (D1/D2/D3), 3 (D4/S1), 4 (S2), 5 (S3)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan tingkat pendidikan tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 4. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pekerjaan Utama

Wilayah PST BPS	Pekerjaan Utama						
	Pelajar/Mahasiswa	Peneliti/Dosen	PNS/TNI/Polri	Pegawai BUMN/D	Pegawai Swasta	Wira swasta	Pekerjaan Utama Lainnya
JAWA TENGAH	50,00	6,94	41,67	0,00	0,00	1,39	0,00
CILACAP	41,94	3,23	29,03	0,00	12,90	0,00	12,90
BANYUMAS	42,86	11,43	25,71	8,57	0,00	2,86	8,57
PURBALINGGA	25,81	0,00	41,94	3,23	6,45	3,23	19,35
BANJARNEGARA	20,59	5,88	52,94	2,94	5,88	0,00	11,76
KEBUMEN	10,53	2,63	63,16	5,26	7,89	0,00	10,53
PURWOREJO	9,09	0,00	60,61	3,03	6,06	0,00	21,21
WONOSOBO	34,38	0,00	53,13	0,00	3,13	6,25	3,13
MAGELANG	36,36	0,00	45,45	0,00	3,03	6,06	9,09
BOYOLALI	27,27	6,06	45,45	6,06	12,12	0,00	3,03
KLATEN	53,33	3,33	33,33	0,00	6,67	3,33	0,00
SUKOHARJO	13,51	2,70	43,24	2,70	16,22	2,70	18,92
WONOGIRI	26,67	0,00	50,00	6,67	3,33	3,33	10,00
KARANGANYAR	30,00	0,00	50,00	3,33	6,67	3,33	6,67
SRAGEN	45,16	0,00	38,71	0,00	3,23	3,23	9,68
GROBOGAN	25,00	0,00	37,50	6,25	15,63	0,00	15,63
BLORA	20,00	0,00	20,00	5,00	12,50	15,00	27,50
REMBANG	25,00	3,13	50,00	0,00	6,25	0,00	15,63
PATI	12,50	0,00	68,75	0,00	9,38	6,25	3,13
KUDUS	18,92	0,00	70,27	0,00	2,70	2,70	5,41
JEPARA	34,38	6,25	25,00	0,00	15,63	12,50	6,25
DEMAK	25,81	0,00	58,06	3,23	3,23	0,00	9,68
SEMARANG	40,00	0,00	40,00	3,33	6,67	0,00	10,00
TEMANGGUNG	33,33	0,00	51,52	3,03	3,03	0,00	9,09
KENDAL	24,24	6,06	57,58	0,00	6,06	3,03	3,03
BATANG	30,00	0,00	56,67	3,33	6,67	0,00	3,33
PEKALONGAN	18,18	0,00	54,55	0,00	15,15	6,06	6,06
PEMALANG	21,88	0,00	59,38	0,00	6,25	0,00	12,50
TEGAL	11,11	0,00	36,11	2,78	2,78	16,67	30,56
BREBES	19,35	3,23	41,94	3,23	0,00	6,45	25,81
KOTA MAGELANG	43,75	3,13	40,63	0,00	3,13	6,25	3,13
KOTA SURAKARTA	8,11	2,70	59,46	8,11	5,41	5,41	10,81
KOTA SALATIGA	40,63	0,00	46,88	3,13	6,25	0,00	3,13
KOTA SEMARANG	44,44	11,11	33,33	2,78	0,00	2,78	5,56
KOTA PEKALONGAN	43,75	0,00	40,63	0,00	3,13	3,13	9,38
KOTA TEGAL	21,88	0,00	59,38	3,13	3,13	0,00	12,50

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Pekerjaan Utama
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan jenis pekerjaan utama
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut pekerjaan utama terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil kunjungan, meliputi Pelajar/Mahasiswa, Peneliti/Dosen, PNS/TNI/Polri, Pegawai BUMN/D, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Lainnya.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen dengan pekerjaan utama ke-i x_i = Jumlah konsumen dengan pekerjaan utama ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $I = 1$ (Pelajar/Mahasiswa), 2 (Peneliti/Dosen), 3 (PNS/TNI/Polri), 4 (Pegawai BUMN/D), 5 (Pegawai Swasta), 6 (Wiraswasta), 7 (Lainnya)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan pekerjaan utama tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	: 2. Pekerjaan Utama
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 5. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Kategori Instansi/Institusi

Wilayah PST BPS	Kategori Instansi/Institusi				
	Lemb. Pendkn. penelitian dalam negeri	Lbg Pendkn. penelitian luar negeri	Kementerian & Lembaga Pemerintah	Lembaga Internasional	Media Massa
JAWA TENGAH	55,56	0,00	6,94	0,00	0,00
CILACAP	45,16	0,00	9,68	0,00	0,00
BANYUMAS	51,43	0,00	2,86	0,00	0,00
PURBALINGGA	22,58	0,00	19,35	0,00	0,00
BANJARNEGARA	20,59	0,00	23,53	0,00	0,00
KEBUMEN	15,79	0,00	10,53	0,00	0,00
PURWOREJO	18,18	3,03	18,18	0,00	0,00
WONOSOBO	34,38	0,00	9,38	0,00	0,00
MAGELANG	39,39	0,00	15,15	0,00	0,00
BOYOLALI	36,36	0,00	6,06	0,00	0,00
KLATEN	56,67	0,00	6,67	0,00	0,00
SUKOHARJO	16,22	0,00	8,11	0,00	0,00
WONOGIRI	23,33	0,00	13,33	0,00	3,33
KARANGANYAR	30,00	0,00	13,33	0,00	0,00
SRAGEN	41,94	0,00	16,13	0,00	0,00
GROBOGAN	31,25	3,13	21,88	0,00	3,13
BLORA	27,50	0,00	10,00	0,00	0,00
REMBANG	21,88	0,00	18,75	0,00	3,13
PATI	18,75	0,00	9,38	0,00	0,00
KUDUS	18,92	0,00	21,62	0,00	0,00
JEPARA	40,63	0,00	15,63	0,00	0,00
DEMAK	25,81	0,00	9,68	0,00	0,00
SEMARANG	43,33	0,00	6,67	0,00	0,00
TEMANGGUNG	42,42	0,00	21,21	0,00	0,00
KENDAL	33,33	0,00	6,06	0,00	0,00
BATANG	30,00	0,00	10,00	0,00	0,00
PEKALONGAN	21,21	0,00	18,18	0,00	0,00
PEMALANG	21,88	0,00	6,25	0,00	3,13
TEGAL	19,44	2,78	2,78	0,00	0,00
BREBES	25,81	0,00	6,45	0,00	0,00
KOTA MAGELANG	53,13	0,00	18,75	0,00	0,00
KOTA SURAKARTA	10,81	0,00	5,41	0,00	5,41
KOTA SALATIGA	40,63	0,00	15,63	0,00	0,00
KOTA SEMARANG	52,78	0,00	2,78	0,00	0,00
KOTA PEKALONGAN	46,88	0,00	6,25	0,00	0,00
KOTA TEGAL	25,00	0,00	6,25	0,00	0,00

Lampiran 5 (lanjutan)

Wilayah PST BPS	Kategori Instansi/Institusi				
	Pemerintah Daerah	Perbankan	BUMN/BUMD	Swasta Lainnya	Kategori Instansi Lainnya
JAWA TENGAH	34,72	0,00	0,00	1,39	1,39
CILACAP	29,03	0,00	0,00	12,90	3,23
BANYUMAS	34,29	0,00	8,57	0,00	2,86
PURBALINGGA	35,48	3,23	3,23	12,90	3,23
BANJARNEGARA	38,24	0,00	2,94	8,82	5,88
KEBUMEN	63,16	0,00	5,26	5,26	0,00
PURWOREJO	54,55	0,00	3,03	3,03	0,00
WONOSOBO	50,00	0,00	0,00	6,25	0,00
MAGELANG	39,39	0,00	0,00	3,03	3,03
BOYOLALI	45,45	3,03	3,03	6,06	0,00
KLATEN	26,67	0,00	0,00	10,00	0,00
SUKOHARJO	45,95	2,70	0,00	13,51	13,51
WONOGIRI	40,00	0,00	6,67	6,67	6,67
KARANGANYAR	46,67	0,00	6,67	3,33	0,00
SRAGEN	25,81	3,23	0,00	3,23	9,68
GROBOGAN	34,38	0,00	3,13	0,00	3,13
BLORA	32,50	0,00	5,00	20,00	5,00
REMBANG	40,63	0,00	0,00	12,50	3,13
PATI	62,50	0,00	0,00	6,25	3,13
KUDUS	54,05	2,70	0,00	2,70	0,00
JEPARA	25,00	3,13	0,00	12,50	3,13
DEMAK	61,29	0,00	3,23	0,00	0,00
SEMARANG	40,00	0,00	3,33	3,33	3,33
TEMANGGUNG	30,30	3,03	0,00	0,00	3,03
KENDAL	54,55	0,00	0,00	6,06	0,00
BATANG	50,00	3,33	0,00	6,67	0,00
PEKALONGAN	39,39	3,03	0,00	12,12	6,06
PEMALANG	59,38	0,00	0,00	3,13	6,25
TEGAL	36,11	2,78	2,78	13,89	19,44
BREBES	51,61	0,00	3,23	6,45	6,45
KOTA MAGELANG	25,00	0,00	0,00	3,13	0,00
KOTA SURAKARTA	56,76	5,41	8,11	2,70	5,41
KOTA SALATIGA	34,38	0,00	0,00	6,25	3,13
KOTA SEMARANG	38,89	0,00	2,78	2,78	0,00
KOTA PEKALONGAN	37,50	0,00	0,00	6,25	3,13
KOTA TEGAL	59,38	3,13	3,13	3,13	0,00

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Instansi/Institusi
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan instansi/institusi
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut instansi/institusi terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen dengan instansi/institusi ke-i x_i = Jumlah konsumen dengan instansi/institusi ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i= 1$ (Lembaga Pendidikan dan Penelitian Dalam Negeri), 2 (Lembaga Pendidikan dan Penelitian Luar Negeri), 3 (Kementerian dan Lembaga Pemerintah), 4 (Lembaga Internasional), 5 (Media Massa), 6 (Pemerintah Daerah), 7 (Perbankan), 8 (BUMN/D), 9 (Swasta), 10 (Lainnya)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan instansi/institusi tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Instansi/institusi
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 6. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pemanfaatan Hasil Kunjungan

Wilayah PST BPS	Pemanfaatan Hasil Kunjungan				
	Tugas Sekolah/ Tugas Kuliah	Pemerintah an	Komersial	Penelitian	Pemanfaatan Lainnya
JAWA TENGAH	31,94	36,11	0,00	31,94	0,00
CILACAP	38,71	38,71	3,23	6,45	12,90
BANYUMAS	37,14	34,29	0,00	22,86	5,71
PURBALINGGA	25,81	51,61	3,23	6,45	12,90
BANJARNEGARA	14,71	67,65	0,00	8,82	8,82
KEBUMEN	7,89	78,95	5,26	5,26	2,63
PURWOREJO	12,12	75,76	0,00	12,12	0,00
WONOSOBO	31,25	59,38	0,00	6,25	3,13
MAGELANG	30,30	54,55	0,00	15,15	0,00
BOYOLALI	27,27	51,52	6,06	9,09	6,06
KLATEN	50,00	33,33	6,67	6,67	3,33
SUKOHARJO	13,51	54,05	8,11	13,51	10,81
WONOGIRI	13,33	53,33	10,00	20,00	3,33
KARANGANYAR	16,67	60,00	6,67	16,67	0,00
SRAGEN	41,94	45,16	0,00	9,68	3,23
GROBOGAN	21,88	59,38	0,00	12,50	6,25
BLORA	22,50	45,00	7,50	15,00	10,00
REMBANG	18,75	46,88	0,00	21,88	12,50
PATI	9,38	62,50	6,25	15,63	6,25
KUDUS	18,92	75,68	2,70	0,00	2,70
JEPARA	34,38	40,63	0,00	15,63	9,38
DEMAK	22,58	74,19	0,00	3,23	0,00
SEMARANG	40,00	53,33	3,33	0,00	3,33
TEMANGGUNG	39,39	51,52	0,00	0,00	9,09
KENDAL	21,21	63,64	3,03	12,12	0,00
BATANG	30,00	60,00	3,33	0,00	6,67
PEKALONGAN	15,15	63,64	9,09	6,06	6,06
PEMALANG	12,50	71,88	0,00	9,38	6,25
TEGAL	13,89	55,56	8,33	5,56	16,67
BREBES	19,35	61,29	3,23	12,90	3,23
KOTA MAGELANG	25,00	50,00	3,13	15,63	6,25
KOTA SURAKARTA	13,51	70,27	2,70	5,41	8,11
KOTA SALATIGA	37,50	46,88	3,13	3,13	9,38
KOTA SEMARANG	27,78	38,89	2,78	30,56	0,00
KOTA PEKALONGAN	31,25	43,75	0,00	15,63	9,38
KOTA TEGAL	15,63	75,00	0,00	9,38	0,00

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Pemanfaatan Hasil Kunjungan
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan pemanfaatan hasil kunjungan
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut pemanfaatan hasil kunjungan terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen dengan pemanfaatan hasil kunjungan ke-i x_i = Jumlah konsumen dengan pemanfaatan hasil kunjungan ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1$ (Tugas Sekolah/Tugas Kuliah), 2 (Skripsi/Tesis/Disertasi), 3 (Penelitian), 4 (Perencanaan dan Evaluasi), 5 (Penyebaran Informasi)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan pemanfaatan hasil kunjungan tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Pemanfaatan hasil kunjungan
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 7. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Jenis Layanan yang Digunakan

Wilayah PST BPS	Jenis Layanan yang Digunakan					
	Perpustakaan	Pembelian Publikasi BPS	Pembelian Data Mikro/ Peta Wilayah Kerja Statistik	Akses Produk Statistik Pada Website BPS	Konsultasi Statistik	Rekomendasi Kegiatan Statistik
JAWA TENGAH	15,45	1,82	1,82	58,18	16,36	6,36
CILACAP	13,79	5,17	3,45	43,10	22,41	12,07
BANYUMAS	36,51	3,17	3,17	42,86	11,11	3,17
PURBALINGGA	32,56	2,33	4,65	51,16	9,30	0,00
BANJARNEGARA	31,91	2,13	2,13	38,30	19,15	6,38
KEBUMEN	38,89	0,00	0,00	37,04	22,22	1,85
PURWOREJO	32,65	0,00	0,00	48,98	14,29	4,08
WONOSOBO	28,57	0,00	0,00	50,00	21,43	0,00
MAGELANG	32,61	0,00	0,00	39,13	28,26	0,00
BOYOLALI	21,67	1,67	1,67	38,33	25,00	11,67
KLATEN	46,34	0,00	0,00	43,90	9,76	0,00
SUKOHARJO	24,00	0,00	0,00	50,00	26,00	0,00
WONOGIRI	26,67	4,44	6,67	40,00	11,11	11,11
KARANGANYAR	25,53	0,00	0,00	44,68	21,28	8,51
SRAGEN	41,30	0,00	4,35	45,65	6,52	2,17
GROBOGAN	45,45	2,27	0,00	25,00	25,00	2,27
BLORA	15,38	5,77	1,92	38,46	13,46	25,00
REMBANG	13,33	3,33	5,00	33,33	30,00	15,00
PATI	28,89	6,67	4,44	24,44	33,33	2,22
KUDUS	37,04	0,00	0,00	35,19	25,93	1,85
JEPARA	31,58	0,00	0,00	28,07	40,35	0,00
DEMAK	38,46	1,92	3,85	34,62	19,23	1,92
SEMARANG	26,83	0,00	2,44	53,66	17,07	0,00
TEMANGGUNG	20,45	0,00	0,00	47,73	31,82	0,00
KENDAL	11,32	1,89	0,00	45,28	32,08	9,43
BATANG	4,35	0,00	0,00	58,70	30,43	6,52
PEKALONGAN	17,14	2,86	2,86	51,43	25,71	0,00
PEMALANG	16,98	1,89	0,00	37,74	32,08	11,32
TEGAL	15,63	1,56	4,69	43,75	21,88	12,50
BREBES	27,27	0,00	4,55	43,18	25,00	0,00
KOTA MAGELANG	25,58	0,00	2,33	60,47	6,98	4,65
KOTA SURAKARTA	10,53	1,32	0,00	40,79	42,11	5,26
KOTA SALATIGA	17,02	0,00	0,00	53,19	29,79	0,00
KOTA SEMARANG	18,37	4,08	0,00	57,14	14,29	6,12
KOTA PEKALONGAN	18,87	0,00	1,89	43,40	35,85	0,00
KOTA TEGAL	27,27	0,00	0,00	50,00	22,73	0,00

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Jenis Layanan yang Digunakan
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan jenis layanan yang digunakan
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut jenis layanan yang digunakan terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen dengan jenis layanan yang digunakan ke-i x_i = Jumlah konsumen dengan jenis layanan yang digunakan ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1$ (Pustaka Tercetak), 2 (Pustaka Digital), 3 (Penjualan Publikasi), 4 (Data Mikro), 5 (Konsultasi Statistik), 6 (Rekomendasi Kegiatan Statistik)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan jenis layanan yang digunakan tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Jenis Layanan yang Digunakan
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 8. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Fasilitas Utama yang Digunakan untuk Memperoleh Data BPS

Wilayah PST BPS	Fasilitas Utama Untuk Memperoleh Data BPS				
	Datang Langsung ke PST	Aplikasi PST Online	Website BPS	Allstats BPS	Fasilitas Lainnya
JAWA TENGAH	11,11	9,26	60,19	6,48	12,96
CILACAP	22,03	6,78	44,07	10,17	16,95
BANYUMAS	44,83	3,45	44,83	0,00	6,90
PURBALINGGA	36,36	11,36	43,18	0,00	9,09
BANJARNEGARA	38,30	10,64	40,43	4,26	6,38
KEBUMEN	33,96	5,66	47,17	1,89	11,32
PURWOREJO	41,30	2,17	52,17	2,17	2,17
WONOSOBO	35,29	7,84	49,02	1,96	5,88
MAGELANG	37,21	4,65	48,84	4,65	4,65
BOYOLALI	30,65	11,29	43,55	8,06	6,45
KLATEN	45,65	0,00	45,65	2,17	6,52
SUKOHARJO	22,41	10,34	55,17	3,45	8,62
WONOGIRI	34,09	6,82	43,18	11,36	4,55
KARANGANYAR	36,17	10,64	48,94	2,13	2,13
SRAGEN	34,78	6,52	45,65	4,35	8,70
GROBOGAN	40,48	7,14	30,95	2,38	19,05
BLORA	28,81	11,86	42,37	13,56	3,39
REMBANG	26,23	18,03	37,70	9,84	8,20
PATI	30,77	12,82	48,72	7,69	0,00
KUDUS	35,42	14,58	39,58	2,08	8,33
JEPARA	42,31	7,69	38,46	5,77	5,77
DEMAK	41,18	15,69	33,33	0,00	9,80
SEMARANG	23,40	6,38	44,68	10,64	14,89
TEMANGGUNG	31,11	0,00	48,89	4,44	15,56
KENDAL	35,00	15,00	38,33	5,00	6,67
BATANG	26,53	0,00	55,10	0,00	18,37
PEKALONGAN	14,29	8,57	51,43	2,86	22,86
PEMALANG	38,71	8,06	38,71	6,45	8,06
TEGAL	26,79	5,36	53,57	12,50	1,79
BREBES	28,89	6,67	42,22	6,67	15,56
KOTA MAGELANG	20,83	10,42	60,42	6,25	2,08
KOTA SURAKARTA	19,18	9,59	46,58	1,37	23,29
KOTA SALATIGA	34,62	0,00	46,15	0,00	19,23
KOTA SEMARANG	12,96	14,81	53,70	5,56	12,96
KOTA PEKALONGAN	26,67	10,00	43,33	3,33	16,67
KOTA TEGAL	35,42	4,17	47,92	0,00	12,50

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Fasilitas Utama yang Digunakan
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan fasilitas utama yang digunakan
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut fasilitas utama yang digunakan terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen dengan fasilitas utama yang digunakan ke-i x_i = Jumlah konsumen dengan fasilitas utama yang digunakan ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1$ (Website BPS), 2 (AllstatsBPS), 3 (Silastik), 4 (Sirusa), 5 (Romantik Online), 6 (Telepon/Faksimili), 7 (e-Mail/Surat), 8 (Datang Langsung ke PST), 9 (Lainnya)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan fasilitas utama yang digunakan tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Fasilitas Utama yang Digunakan
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 9. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS Sebagai Rujukan Utama

Wilayah PST BPS	Fasilitas Utama Untuk Memperoleh Data BPS	
	Sebagai Rujukan Utama	Bukan Rujukan Utama
JAWA TENGAH	97,22	2,78
CILACAP	77,42	22,58
BANYUMAS	82,86	17,14
PURBALINGGA	80,65	19,35
BANJARNEGARA	88,24	11,76
KEBUMEN	97,37	2,63
PURWOREJO	75,76	24,24
WONOSOBO	71,88	28,13
MAGELANG	90,91	9,09
BOYOLALI	100,00	0,00
KLATEN	93,33	6,67
SUKOHARJO	75,68	24,32
WONOGIRI	96,67	3,33
KARANGANYAR	90,00	10,00
SRAGEN	64,52	35,48
GROBOGAN	93,75	6,25
BLORA	82,50	17,50
REMBANG	96,88	3,13
PATI	81,25	18,75
KUDUS	89,19	10,81
JEPARA	90,63	9,38
DEMAK	93,55	6,45
SEMARANG	90,00	10,00
TEMANGGUNG	96,97	3,03
KENDAL	96,97	3,03
BATANG	96,67	3,33
PEKALONGAN	84,85	15,15
PEMALANG	100,00	0,00
TEGAL	83,33	16,67
BREBES	87,10	12,90
KOTA MAGELANG	87,50	12,50
KOTA SURAKARTA	97,30	2,70
KOTA SALATIGA	90,63	9,38
KOTA SEMARANG	80,56	19,44
KOTA PEKALONGAN	90,63	9,38
KOTA TEGAL	81,25	18,75

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST BPS dan Penggunaan Data BPS Sebagai Rujukan Utama
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan penggunaan data BPS sebagai rujukan utama
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut penggunaan data BPS sebagai rujukan utama terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah. Rujukan utama adalah penggunaan data BPS sebagai acuan utama dalam melakukan suatu kegiatan.
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p = Persentase konsumen yang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama x = Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	: Wilayah PST BPS
Penyajian	
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 10. Persentase Konsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

Wilayah PST BPS	Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan dan Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan
JAWA TENGAH	100,00
CILACAP	100,00
BANYUMAS	90,00
PURBALINGGA	83,33
BANJARNEGARA	100,00
KEBUMEN	100,00
PURWOREJO	87,50
WONOSOBO	76,92
MAGELANG	90,00
BOYOLALI	87,50
KLATEN	100,00
SUKOHARJO	84,21
WONOGIRI	100,00
KARANGANYAR	93,75
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	76,47
BLORA	33,33
REMBANG	86,67
PATI	90,91
KUDUS	85,71
JEPARA	91,67
DEMAK	95,45
SEMARANG	85,71
TEMANGGUNG	100,00
KENDAL	85,71
BATANG	100,00
PEKALONGAN	84,21
PEMALANG	93,33
TEGAL	100,00
BREBES	94,44
KOTA MAGELANG	100,00
KOTA SURAKARTA	95,65
KOTA SALATIGA	93,75
KOTA SEMARANG	88,89
KOTA PEKALONGAN	100,00
KOTA TEGAL	86,67

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan menurut wilayah PST BPS
Konsep	:	Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen menurut penggunaan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p = Persentase konsumen yang menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan x = Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah PST BPS
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Lampiran 11. Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Level Data

Wilayah PST BPS	Fasilitas Utama Untuk Memperoleh Data BPS						
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Individu	Lainnya
JAWA TENGAH	1,95	63,31	33,28	0,97	0,49	0,00	0,00
CILACAP	2,14	4,70	64,53	18,38	10,26	0,00	0,00
BANYUMAS	0,00	1,90	40,76	19,43	37,91	0,00	0,00
PURBALINGGA	1,88	0,00	31,25	38,13	28,75	0,00	0,00
BANJARNEGARA	0,00	0,00	66,23	33,77	0,00	0,00	0,00
KEBUMEN	0,84	1,69	54,85	40,08	2,53	0,00	0,00
PURWOREJO	0,00	13,42	68,40	5,19	12,99	0,00	0,00
WONOSOBO	0,00	0,00	62,04	26,28	11,68	0,00	0,00
MAGELANG	5,53	0,00	78,34	12,90	1,84	1,38	0,00
BOYOLALI	0,00	0,00	88,89	4,94	6,17	0,00	0,00
KLATEN	0,00	0,00	52,20	41,69	6,10	0,00	0,00
SUKOHARJO	5,00	0,00	65,83	15,42	13,75	0,00	0,00
WONOGIRI	0,00	5,65	65,32	28,23	0,81	0,00	0,00
KARANGANYAR	2,33	0,00	79,07	15,12	3,49	0,00	0,00
SRAGEN	0,00	0,00	39,60	7,92	52,48	0,00	0,00
GROBOGAN	1,65	4,96	46,28	35,54	11,57	0,00	0,00
BLORA	0,00	0,00	81,94	8,33	9,72	0,00	0,00
REMBANG	13,06	0,00	14,29	66,12	6,53	0,00	0,00
PATI	0,00	0,00	93,55	6,45	0,00	0,00	0,00
KUDUS	0,00	0,00	54,90	35,29	9,80	0,00	0,00
JEPARA	0,00	0,00	58,46	39,23	2,31	0,00	0,00
DEMAK	0,00	0,00	39,76	27,71	32,53	0,00	0,00
SEMARANG	0,00	1,11	67,22	21,11	10,56	0,00	0,00
TEMANGGUNG	0,00	14,77	56,82	23,86	4,55	0,00	0,00
KENDAL	0,00	0,00	45,89	12,67	34,25	0,00	7,19
BATANG	0,00	0,00	63,54	26,04	10,42	0,00	0,00
PEKALONGAN	0,00	0,00	75,68	17,57	6,76	0,00	0,00
PEMALANG	0,00	2,80	59,81	34,58	2,80	0,00	0,00
TEGAL	0,59	0,00	97,95	1,47	0,00	0,00	0,00
BREBES	0,00	0,00	90,38	7,69	1,92	0,00	0,00
KOTA MAGELANG	0,00	0,00	76,33	0,00	13,53	10,14	0,00
KOTA SURAKARTA	0,00	0,40	90,80	6,80	2,00	0,00	0,00
KOTA SALATIGA	0,00	0,00	99,24	0,00	0,76	0,00	0,00
KOTA SEMARANG	0,00	7,33	30,33	18,33	44,00	0,00	0,00
KOTA PEKALONGAN	2,29	0,00	86,26	9,16	2,29	0,00	0,00
KOTA TEGAL	0,00	0,00	70,37	6,67	22,96	0,00	0,00

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST BPS dan Level Data
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan level data yang dicari
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen yang mencari data menurut level data terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen yang mencari data pada level ke-i x_i = Jumlah konsumen yang mencari data pada level ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1$ (Nasional), 2 (Provinsi), 3 (Kabupaten/Kota), 4 (Kecamatan), 5 (Desa/Kelurahan), 6 (Individu), 7 (Lainnya)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang mencari data pada level tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Level Data
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 12. Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Periode Data

Wilayah PST BPS	Periode Data SKD 2021				
	10 Tahunan	5 Tahunan	3 Tahunan	Tahunan	Semesteran
JAWA TENGAH	2,11	6,33	0,49	78,57	0,00
CILACAP	7,27	5,13	2,14	82,91	0,00
BANYUMAS	0,00	7,11	0,95	91,47	0,00
PURBALINGGA	0,00	32,50	0,00	65,00	1,25
BANJARNEGARA	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00
KEBUMEN	12,24	8,02	2,53	55,27	2,53
PURWOREJO	0,87	2,16	0,00	95,67	0,00
WONOSOBO	8,03	5,84	0,73	83,94	0,00
MAGELANG	0,00	0,92	0,00	79,72	0,00
BOYOLALI	0,00	16,05	0,00	81,48	0,00
KLATEN	0,34	9,49	0,00	77,97	0,00
SUKOHARJO	5,42	19,58	0,00	68,75	5,00
WONOGIRI	8,06	4,84	0,81	53,23	5,65
KARANGANYAR	12,79	9,30	0,00	77,91	0,00
SRAGEN	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00
GROBOGAN	1,65	4,96	0,00	93,39	0,00
BLORA	2,78	0,00	2,78	88,89	2,78
REMBANG	0,00	2,45	15,92	67,35	1,22
PATI	3,23	3,23	0,00	90,32	3,23
KUDUS	3,92	1,96	5,88	88,24	0,00
JEPARA	0,00	0,00	2,31	90,77	5,38
DEMAK	2,41	0,00	0,00	95,18	0,00
SEMARANG	0,00	7,22	0,00	90,00	1,11
TEMANGGUNG	0,00	0,00	0,00	82,95	17,05
KENDAL	0,00	7,19	0,00	90,07	2,74
BATANG	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
PEKALONGAN	0,00	0,00	0,00	94,59	2,70
PEMALANG	0,00	35,98	0,00	59,81	0,47
TEGAL	0,00	2,64	0,00	96,48	0,00
BREBES	0,00	3,21	0,00	95,51	1,28
KOTA MAGELANG	5,80	5,31	3,38	76,33	6,28
KOTA SURAKARTA	4,00	0,00	0,00	87,60	0,00
KOTA SALATIGA	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00
KOTA SEMARANG	0,00	19,33	0,00	61,33	5,67
KOTA PEKALONGAN	9,16	9,92	0,00	80,15	0,76
KOTA TEGAL	4,44	7,41	0,00	63,70	0,74

Lampiran 12 (Lanjutan)

Wilayah PST BPS	Periode Data SKD 2021				
	Triwulanan	Bulanan	Mingguan	Harian	Lainnya
JAWA TENGAH	2,11	6,33	0,49	78,57	0,00
CILACAP	7,27	5,13	2,14	82,91	0,00
BANYUMAS	0,00	7,11	0,95	91,47	0,00
PURBALINGGA	0,00	32,50	0,00	65,00	1,25
BANJARNEGARA	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00
KEBUMEN	12,24	8,02	2,53	55,27	2,53
PURWOREJO	0,87	2,16	0,00	95,67	0,00
WONOSOBO	8,03	5,84	0,73	83,94	0,00
MAGELANG	0,00	0,92	0,00	79,72	0,00
BOYOLALI	0,00	16,05	0,00	81,48	0,00
KLATEN	0,34	9,49	0,00	77,97	0,00
SUKOHARJO	5,42	19,58	0,00	68,75	5,00
WONOGIRI	8,06	4,84	0,81	53,23	5,65
KARANGANYAR	12,79	9,30	0,00	77,91	0,00
SRAGEN	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00
GROBOGAN	1,65	4,96	0,00	93,39	0,00
BLORA	2,78	0,00	2,78	88,89	2,78
REMBANG	0,00	2,45	15,92	67,35	1,22
PATI	3,23	3,23	0,00	90,32	3,23
KUDUS	3,92	1,96	5,88	88,24	0,00
JEPARA	0,00	0,00	2,31	90,77	5,38
DEMAK	2,41	0,00	0,00	95,18	0,00
SEMARANG	0,00	7,22	0,00	90,00	1,11
TEMANGGUNG	0,00	0,00	0,00	82,95	17,05
KENDAL	0,00	7,19	0,00	90,07	2,74
BATANG	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
PEKALONGAN	0,00	0,00	0,00	94,59	2,70
PEMALANG	0,00	35,98	0,00	59,81	0,47
TEGAL	0,00	2,64	0,00	96,48	0,00
BREBES	0,00	3,21	0,00	95,51	1,28
KOTA MAGELANG	5,80	5,31	3,38	76,33	6,28
KOTA SURAKARTA	4,00	0,00	0,00	87,60	0,00
KOTA SALATIGA	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00
KOTA SEMARANG	0,00	19,33	0,00	61,33	5,67
KOTA PEKALONGAN	9,16	9,92	0,00	80,15	0,76
KOTA TEGAL	4,44	7,41	0,00	63,70	0,74

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST BPS dan Periode Data
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan periode data yang dicari
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen yang mencari data menurut periode data terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen yang mencari data pada periode ke-i x_i = Jumlah konsumen yang mencari data pada periode ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i=$ 1 (10 Tahunan), 2 (5 Tahunan), 3 (3 Tahunan), 4 (Tahunan), 5 (Semesteran), 6 (Triwulanan), 7 (Bulanan), 8 (Mingguan), 9 (Harian), 10 (Lainnya)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang mencari data pada periode tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Periode Data
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

Lampiran 13. Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Jenis Perolehan Datanya

Wilayah PST BPS	Jenis Perolehan Data			
	Diperoleh dan Sesuai	Diperoleh tetapi Tidak Sesuai	Tidak Diperoleh	Belum Diperoleh
JAWA TENGAH	90,10	0,97	0,49	8,44
CILACAP	66,67	12,39	8,12	12,82
BANYUMAS	54,50	7,11	3,32	35,07
PURBALINGGA	54,38	6,88	15,63	23,13
BANJARNEGARA	92,21	0,00	0,00	7,79
KEBUMEN	59,07	0,00	0,84	40,08
PURWOREJO	51,08	44,59	2,16	2,16
WONOSOBO	59,12	23,36	0,00	17,52
MAGELANG	53,00	0,00	11,52	35,48
BOYOLALI	81,48	11,11	2,47	4,94
KLATEN	75,93	7,46	2,71	13,90
SUKOHARJO	72,50	0,83	2,08	24,58
WONOGIRI	61,29	1,61	0,00	37,10
KARANGANYAR	77,91	0,00	4,65	17,44
SRAGEN	62,38	16,83	0,00	20,79
GROBOGAN	100,00	0,00	0,00	0,00
BLORA	88,89	0,00	0,00	11,11
REMBANG	28,98	1,22	0,00	69,80
PATI	80,65	16,13	0,00	3,23
KUDUS	96,08	0,00	0,00	3,92
JEPARA	80,00	2,31	0,00	17,69
DEMAK	84,34	1,20	12,05	2,41
SEMARANG	90,00	3,89	3,33	2,78
TEMANGGUNG	52,27	2,84	3,41	41,48
KENDAL	81,85	0,00	0,00	18,15
BATANG	90,63	7,29	0,00	2,08
PEKALONGAN	70,27	6,76	20,27	2,70
PEMALANG	26,17	4,67	28,04	41,12
TEGAL	25,81	0,00	42,82	31,38
BREBES	98,08	1,92	0,00	0,00
KOTA MAGELANG	62,32	0,00	10,14	27,54
KOTA SURAKARTA	85,20	0,00	8,00	6,80
KOTA SALATIGA	99,24	0,76	0,00	0,00
KOTA SEMARANG	41,67	7,00	4,67	46,67
KOTA PEKALONGAN	84,73	0,00	2,29	12,98
KOTA TEGAL	57,04	8,89	1,48	32,59

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST BPS dan Jenis Perolehan Data
Konsep	: Untuk mengetahui segmentasi responden SKD berdasarkan jenis perolehan data
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen menurut jenis perolehan data terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen dengan jenis perolehan data ke- i x_i = Jumlah konsumen dengan jenis perolehan data ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1$ (Diperoleh dan sesuai), 2 (Diperoleh tetapi tidak sesuai), 3 (Tidak diperoleh), 4 (Belum diperoleh)
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan jenis perolehan data tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah PST BPS
Penyajian	2. Jenis Perolehan Data
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

**Lampiran 14. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kualitas Data
Menurut Wilayah Penyedia Data**

Wilayah PST BPS	Puas Terhadap Kematakhiran Data
JAWA TENGAH	89,84
CILACAP	96,22
BANYUMAS	96,15
PURBALINGGA	100,00
BANJARNEGARA	91,55
KEBUMEN	100,00
PURWOREJO	95,93
WONOSOBO	98,23
MAGELANG	100,00
BOYOLALI	100,00
KLATEN	100,00
SUKOHARJO	75,57
WONOGIRI	98,72
KARANGANYAR	97,01
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	87,60
BLORA	100,00
REMBANG	95,95
PATI	83,33
KUDUS	100,00
JEPARA	91,59
DEMAK	90,14
SEMARANG	99,41
TEMANGGUNG	97,94
KENDAL	100,00
BATANG	100,00
PEKALONGAN	82,46
PEMALANG	81,82
TEGAL	100,00
BREBES	100,00
KOTA MAGELANG	100,00
KOTA SURAKARTA	99,06
KOTA SALATIGA	100,00
KOTA SEMARANG	85,62
KOTA PEKALONGAN	100,00
KOTA TEGAL	83,15

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kualitas Data Menurut Wilayah Penyedia Data BPS
Konsep	:	Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang puas terhadap kualitas data BPS
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen yang puas terhadap kualitas data BPS terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap kualitas data BPS yang dihasilkan oleh wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p = Persentase konsumen yang puas terhadap kualitas data BPS x = Jumlah konsumen yang puas terhadap kualitas data BPS y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	:	
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

**Lampiran 15. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kelengkapan Data
Menurut Wilayah Penyedia Data**

Wilayah PST BPS	Puas Terhadap Kelengkapan Data
JAWA TENGAH	90,37
CILACAP	98,38
BANYUMAS	96,15
PURBALINGGA	100,00
BANJARNEGARA	100,00
KEBUMEN	100,00
PURWOREJO	98,64
WONOSOBO	59,29
MAGELANG	93,04
BOYOLALI	100,00
KLATEN	100,00
SUKOHARJO	82,39
WONOGIRI	87,18
KARANGANYAR	100,00
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	66,12
BLORA	100,00
REMBANG	95,95
PATI	83,33
KUDUS	95,92
JEPARA	91,59
DEMAK	85,92
SEMARANG	95,27
TEMANGGUNG	97,94
KENDAL	100,00
BATANG	97,87
PEKALONGAN	77,19
PEMALANG	89,39
TEGAL	100,00
BREBES	100,00
KOTA MAGELANG	100,00
KOTA SURAKARTA	99,06
KOTA SALATIGA	100,00
KOTA SEMARANG	85,62
KOTA PEKALONGAN	100,00
KOTA TEGAL	83,15

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kelengkapan Data Menurut Wilayah Penyedia Data BPS
Konsep	: Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang puas terhadap kelengkapan data BPS
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen yang puas terhadap kelengkapan data BPS terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap kelengkapan data BPS yang dihasilkan oleh wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p = Persentase konsumen yang puas terhadap kelengkapan data BPS x = Jumlah konsumen yang puas terhadap kelengkapan data BPS y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	: Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

**Lampiran 16. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akurasi Data
Menurut Wilayah Penyedia Data**

Wilayah PST BPS	Puas Terhadap Akurasi Data
JAWA TENGAH	91,98
CILACAP	99,46
BANYUMAS	96,15
PURBALINGGA	100,00
BANJARNEGARA	98,59
KEBUMEN	100,00
PURWOREJO	98,64
WONOSOBO	98,23
MAGELANG	93,04
BOYOLALI	100,00
KLATEN	100,00
SUKOHARJO	80,68
WONOGIRI	96,15
KARANGANYAR	97,01
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	60,33
BLORA	100,00
REMBANG	95,95
PATI	90,00
KUDUS	95,92
JEPARA	95,33
DEMAK	88,73
SEMARANG	99,41
TEMANGGUNG	100,00
KENDAL	100,00
BATANG	100,00
PEKALONGAN	87,72
PEMALANG	87,88
TEGAL	88,64
BREBES	100,00
KOTA MAGELANG	100,00
KOTA SURAKARTA	99,06
KOTA SALATIGA	100,00
KOTA SEMARANG	85,62
KOTA PEKALONGAN	100,00
KOTA TEGAL	92,13

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akurasi Data Menurut Wilayah Penyedia Data BPS
Konsep	:	Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang puas terhadap akurasi data BPS
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen yang puas terhadap akurasi data BPS terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap akurasi data BPS yang dihasilkan oleh wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p = Persentase konsumen yang puas terhadap akurasi data BPS x = Jumlah konsumen yang puas terhadap akurasi data BPS y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	:	
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Lampiran 17. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kemutakhiran Data Menurut Wilayah Penyedia Data

Wilayah PST BPS	Puas Terhadap Kemutakhiran Data
JAWA TENGAH	89,84
CILACAP	96,22
BANYUMAS	96,15
PURBALINGGA	100,00
BANJARNEGARA	91,55
KEBUMEN	100,00
PURWOREJO	95,93
WONOSOBO	98,23
MAGELANG	100,00
BOYOLALI	100,00
KLATEN	100,00
SUKOHARJO	75,57
WONOGIRI	98,72
KARANGANYAR	97,01
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	87,60
BLORA	100,00
REMBANG	95,95
PATI	83,33
KUDUS	100,00
JEPARA	91,59
DEMAK	90,14
SEMARANG	99,41
TEMANGGUNG	97,94
KENDAL	100,00
BATANG	100,00
PEKALONGAN	82,46
PEMALANG	81,82
TEGAL	100,00
BREBES	100,00
KOTA MAGELANG	100,00
KOTA SURAKARTA	99,06
KOTA SALATIGA	100,00
KOTA SEMARANG	85,62
KOTA PEKALONGAN	100,00
KOTA TEGAL	83,15

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Kemutakhiran Data Menurut Wilayah Penyedia Data BPS
Konsep	:	Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang puas terhadap kemutakhiran data BPS
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen yang puas terhadap kemutakhiran data BPS terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap kemutakhiran data BPS yang dihasilkan oleh wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p = Persentase konsumen yang puas terhadap kemutakhiran data BPS x = Jumlah konsumen yang puas terhadap kemutakhiran data BPS y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	:	
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

**Lampiran 18. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Pelayanan
Menurut Wilayah PST**

Wilayah PST BPS	Puas Terhadap Pelayanan
JAWA TENGAH	100,00
CILACAP	91,35
BANYUMAS	94,57
PURBALINGGA	95,18
BANJARNEGARA	90,91
KEBUMEN	95,81
PURWOREJO	96,97
WONOSOBO	92,83
MAGELANG	96,07
BOYOLALI	100,00
KLATEN	99,33
SUKOHARJO	88,71
WONOGIRI	98,35
KARANGANYAR	92,67
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	91,93
BLORA	94,53
REMBANG	85,49
PATI	87,50
KUDUS	96,77
JEPARA	94,41
DEMAK	86,82
SEMARANG	95,68
TEMANGGUNG	97,58
KENDAL	97,28
BATANG	99,00
PEKALONGAN	96,98
PEMALANG	94,50
TEGAL	96,95
BREBES	96,49
KOTA MAGELANG	83,80
KOTA SURAKARTA	94,86
KOTA SALATIGA	100,00
KOTA SEMARANG	94,48
KOTA PEKALONGAN	96,58
KOTA TEGAL	95,00

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Pelayanan Data Menurut Wilayah Penyedia Data BPS
Konsep	:	Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang puas terhadap pelayanan data BPS
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen yang puas terhadap pelayanan data BPS terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap pelayanan data BPS yang dihasilkan oleh wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p = Persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan data BPS x = Jumlah konsumen yang puas terhadap pelayanan data BPS y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	:	
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

**Lampiran 19. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data
Menurut Wilayah PST**

Wilayah PST BPS	Puas Terhadap Akses Data
JAWA TENGAH	100,00
CILACAP	87,10
BANYUMAS	100,00
PURBALINGGA	93,55
BANJARNEGARA	97,06
KEBUMEN	97,37
PURWOREJO	100,00
WONOSOBO	96,88
MAGELANG	96,97
BOYOLALI	100,00
KLATEN	96,67
SUKOHARJO	91,89
WONOGIRI	96,67
KARANGANYAR	96,67
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	87,50
BLORA	97,50
REMBANG	93,75
PATI	93,75
KUDUS	97,30
JEPARA	96,88
DEMAK	93,55
SEMARANG	96,67
TEMANGGUNG	100,00
KENDAL	96,97
BATANG	96,67
PEKALONGAN	96,97
PEMALANG	96,88
TEGAL	91,67
BREBES	96,77
KOTA MAGELANG	90,63
KOTA SURAKARTA	100,00
KOTA SALATIGA	100,00
KOTA SEMARANG	91,67
KOTA PEKALONGAN	96,88
KOTA TEGAL	96,88

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data Menurut Wilayah Penyedia Data BPS
Konsep	:	Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang puas terhadap akses data BPS
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS yang dihasilkan oleh wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p = Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS x = Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	:	
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Lampiran 20. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah PST

Wilayah PST BPS	Puas Terhadap Sarana dan Prasarana
JAWA TENGAH	100,00
CILACAP	90,32
BANYUMAS	91,43
PURBALINGGA	93,55
BANJARNEGARA	86,76
KEBUMEN	96,05
PURWOREJO	98,48
WONOSOBO	89,06
MAGELANG	90,91
BOYOLALI	100,00
KLATEN	100,00
SUKOHARJO	85,14
WONOGIRI	95,00
KARANGANYAR	86,67
SRAGEN	100,00
GROBOGAN	89,06
BLORA	92,50
REMBANG	84,38
PATI	82,81
KUDUS	94,59
JEPARA	90,63
DEMAK	77,42
SEMARANG	93,33
TEMANGGUNG	98,48
KENDAL	95,45
BATANG	98,33
PEKALONGAN	96,97
PEMALANG	93,75
TEGAL	95,83
BREBES	95,16
KOTA MAGELANG	82,81
KOTA SURAKARTA	93,24
KOTA SALATIGA	100,00
KOTA SEMARANG	93,06
KOTA PEKALONGAN	95,31
KOTA TEGAL	96,88

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah Penyedia Data BPS
Konsep	:	Untuk mendapatkan gambaran responden SKD yang puas terhadap akses data BPS
Definisi	:	Perbandingan jumlah konsumen yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Interpretasi	:	Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS yang dihasilkan oleh wilayah penyedia data BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	:	$p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	:	dimana: p = Persentase konsumen yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS x = Jumlah konsumen yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS y = Jumlah seluruh konsumen
Klasifikasi	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	:	
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

**Lampiran 21. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Pelayanan
Menurut Wilayah PST dan Atribut Pelayanan**

Wilayah PST BPS	Atribut Pelayanan				
	R1 Puas	R2 Puas	R3 Puas	R4 Puas	R5 Puas
JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CILACAP	90,32	96,77	90,32	93,55	90,32
BANYUMAS	97,14	94,29	91,43	97,14	97,14
PURBALINGGA	93,55	100,00	96,77	100,00	100,00
BANJARNEGARA	91,18	94,12	79,41	91,18	91,18
KEBUMEN	97,37	97,37	94,74	94,74	89,47
PURWOREJO	96,97	96,97	90,91	100,00	90,91
WONOSOBO	96,88	96,88	84,38	90,63	96,88
MAGELANG	96,97	96,97	100,00	90,91	100,00
BOYOLALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KLATEN	100,00	100,00	100,00	100,00	96,67
SUKOHARJO	86,49	91,89	83,78	91,89	89,19
WONOGIRI	100,00	100,00	96,67	100,00	100,00
KARANGANYAR	93,33	90,00	93,33	96,67	93,33
SRAGEN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GROBOGAN	96,88	93,75	90,63	93,75	90,63
BLORA	95,00	97,50	92,50	95,00	97,50
REMBANG	81,25	87,50	87,50	78,13	87,50
PATI	93,75	90,63	84,38	84,38	81,25
KUDUS	97,30	97,30	100,00	100,00	97,30
JEPARA	96,88	100,00	96,88	93,75	87,50
DEMAK	77,42	87,10	90,32	90,32	93,55
SEMARANG	96,67	96,67	100,00	93,33	96,67
TEMANGGUNG	96,97	96,97	93,94	100,00	96,97
KENDAL	100,00	96,97	96,97	100,00	96,97
BATANG	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00
PEKALONGAN	100,00	100,00	96,97	93,94	96,97
PEMALANG	96,88	96,88	90,63	87,50	96,88
TEGAL	100,00	97,22	100,00	97,22	97,22
BREBES	93,55	96,77	96,77	100,00	100,00
KOTA MAGELANG	84,38	81,25	81,25	84,38	87,50
KOTA SURAKARTA	94,59	94,59	91,89	97,30	100,00
KOTA SALATIGA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KOTA SEMARANG	91,67	94,44	94,44	100,00	94,44
KOTA PEKALONGAN	93,75	96,88	96,88	96,88	93,75
KOTA TEGAL	93,75	96,88	93,75	93,75	93,75

Lampiran 21 (lanjutan)

Wilayah PST BPS	Atribut Pelayanan					
	R6 Puas	R7 Puas	R8 Puas	R9 Puas	R10 Puas	R11 Puas
JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CILACAP	93,55	87,10	90,32	93,55	87,10	100,00
BANYUMAS	97,14	100,00	94,29	91,43	85,71	0,00
PURBALINGGA	96,77	93,55	96,77	83,87	90,32	100,00
BANJARNEGARA	88,24	97,06	97,06	94,12	85,29	100,00
KEBUMEN	97,37	97,37	94,74	100,00	94,74	100,00
PURWOREJO	96,97	100,00	100,00	96,97	100,00	0,00
WONOSOBO	90,63	96,88	90,63	96,88	87,50	100,00
MAGELANG	90,91	96,97	96,97	100,00	90,91	100,00
BOYOLALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KLATEN	100,00	96,67	100,00	100,00	100,00	0,00
SUKOHARJO	86,49	91,89	91,89	89,19	83,78	100,00
WONOGIRI	93,33	96,67	100,00	100,00	96,67	100,00
KARANGANYAR	93,33	96,67	93,33	96,67	80,00	0,00
SRAGEN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GROBOGAN	90,63	87,50	93,75	93,75	87,50	100,00
BLORA	95,00	97,50	90,00	95,00	90,00	100,00
REMBANG	87,50	93,75	90,63	81,25	81,25	75,00
PATI	84,38	93,75	87,50	93,75	81,25	0,00
KUDUS	100,00	97,30	94,59	94,59	89,19	100,00
JEPARA	90,63	96,88	96,88	93,75	90,63	100,00
DEMAK	80,65	93,55	87,10	93,55	74,19	100,00
SEMARANG	96,67	96,67	93,33	96,67	90,00	100,00
TEMANGGUNG	100,00	100,00	100,00	93,94	96,97	100,00
KENDAL	100,00	96,97	96,97	96,97	90,91	100,00
BATANG	96,67	96,67	100,00	100,00	100,00	0,00
PEKALONGAN	96,97	96,97	96,97	96,97	96,97	0,00
PEMALANG	96,88	96,88	93,75	96,88	90,63	100,00
TEGAL	97,22	91,67	97,22	97,22	94,44	100,00
BREBES	96,77	96,77	100,00	93,55	93,55	66,67
KOTA MAGELANG	87,50	90,63	81,25	81,25	78,13	100,00
KOTA SURAKARTA	91,89	100,00	91,89	91,89	94,59	0,00
KOTA SALATIGA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
KOTA SEMARANG	94,44	91,67	100,00	94,44	91,67	50,00
KOTA PEKALONGAN	93,75	96,88	100,00	100,00	96,88	100,00
KOTA TEGAL	100,00	96,88	90,63	96,88	93,75	0,00

Lampiran 21 (lanjutan)

No.	Keterangan
1.	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan, mudah dipenuhi/disiapkan
2.	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan, mudah diikuti/dilakukan
3.	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan yang diterima
4.	Biaya pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan biaya yang dibayarkan
5.	Produk pelayanan yang diterima, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
6.	Sarana prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan
7.	Kemudahan akses data melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11)
8.	Data pada <i>website</i> BPS mudah dicari
9.	Konten pada <i>website</i> BPS mudah diunduh
10.	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik
11.	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas
12.	Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui
13.	Proses penanganan pengaduan mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit

Metadata Indikator

Nama Indikator	: Persentase Konsumen yang Puas Menurut Wilayah PST BPS dan Atribut Pelayanan
Konsep	: Untuk mengetahui kepuasan responden SKD berdasarkan atribut pelayanan
Definisi	: Perbandingan jumlah konsumen yang puas menurut atribut pelayanan terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Rumus	: $p_i = x_i / y \times 100\%$
Penghitungan	dimana: p_i = Persentase konsumen yang puas terhadap atribut pelayanan ke-i x_i = Jumlah konsumen yang puas terhadap atribut pelayanan ke-i y = Jumlah seluruh konsumen $i = 1, \dots, 15$
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen yang puas terhadap atribut pelayanan tersebut pada wilayah PST BPS di Provinsi Jawa Tengah.
Klasifikasi	: 1. Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian	2. Atribut Pelayanan
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen

**Lampiran 22. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Pelayanan BPS
Menurut Wilayah PST**

Wilayah PST BPS	IKK Pelayanan BPS
JAWA TENGAH	94,22
CILACAP	89,39
BANYUMAS	89,59
PURBALINGGA	91,96
BANJARNEGARA	86,16
KEBUMEN	90,13
PURWOREJO	88,43
WONOSOBO	89,71
MAGELANG	89,45
BOYOLALI	93,68
KLATEN	92,57
SUKOHARJO	86,34
WONOGIRI	90,56
KARANGANYAR	88,94
SRAGEN	92,05
GROBOGAN	89,95
BLORA	88,91
REMBANG	87,63
PATI	85,79
KUDUS	87,70
JEPARA	91,29
DEMAK	87,17
SEMARANG	91,95
TEMANGGUNG	90,56
KENDAL	90,59
BATANG	92,61
PEKALONGAN	84,82
PEMALANG	92,45
TEGAL	91,85
BREBES	91,39
KOTA MAGELANG	86,77
KOTA SURAKARTA	88,67
KOTA SALATIGA	96,22
KOTA SEMARANG	89,54
KOTA PEKALONGAN	94,83
KOTA TEGAL	90,02

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan BPS Menurut Wilayah PST
Konsep	:	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan
Definisi	:	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS. Indeks ini diperoleh dengan menghitung penimbang yang didapatkan dari tingkat kepentingan konsumen, sehingga untuk menghitung IKK diperlukan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dari konsumen.
Rumus Penghitungan	:	$IKK = \left(\left(\sum_{i=1}^{13} x_i \right) \times 100 \right) / y$ <p>dimana:</p> <p>x_i = Rata-rata tingkat kepuasan tertimbang atribut pelayanan ke-i</p> <p>$x_i = w_i \times z_i$, w_i = penimbang unsur ke-i = Rata-rata skor kepentingan atribut pelayanan ke-i / jumlah rata-rata skor kepentingan</p> <p>z_i = Rata-rata skor kepuasan terhadap atribut pelayanan ke-i</p> <p>y = Skala maksimum penilaian</p>
Interpretasi	:	Sesuai PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, interpretasi nilai IKK adalah 25,00-64,99 : Tidak Baik 65,00-76,60 : Kurang Baik 76,61-88,30 : Baik 88,31-100,00 : Sangat Baik
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-

**Lampiran 23. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS
Menurut Wilayah Penyedia Data**

Wilayah PST BPS	IKK Kualitas Data BPS
JAWA TENGAH	92,03
CILACAP	87,33
BANYUMAS	90,89
PURBALINGGA	89,82
BANJARNEGARA	85,53
KEBUMEN	92,64
PURWOREJO	88,86
WONOSOBO	85,38
MAGELANG	89,81
BOYOLALI	98,38
KLATEN	91,58
SUKOHARJO	85,76
WONOGIRI	89,39
KARANGANYAR	86,25
SRAGEN	91,72
GROBOGAN	83,58
BLORA	89,23
REMBANG	84,35
PATI	82,67
KUDUS	85,73
JEPARA	90,56
DEMAK	85,16
SEMARANG	87,91
TEMANGGUNG	93,33
KENDAL	97,27
BATANG	93,77
PEKALONGAN	79,65
PEMALANG	89,72
TEGAL	91,50
BREBES	93,77
KOTA MAGELANG	93,73
KOTA SURAKARTA	89,60
KOTA SALATIGA	95,19
KOTA SEMARANG	89,43
KOTA PEKALONGAN	97,67
KOTA TEGAL	91,84

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Konsumen terhadap Kualitas Data BPS Menurut Wilayah PST
Konsep	:	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna data BPS
Definisi	:	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap kualitas data adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. Indeks ini diperoleh dengan menghitung penimbang yang didapatkan dari tingkat kepuasan konsumen terhadap empat aspek.
Rumus Penghitungan	:	$IKK = \left(\left(\sum_{i=1}^4 x_i \right) \times 100 \right) / y$ <p>dimana:</p> <p>x_i = Rata-rata tingkat kepuasan tertimbang aspek kualitas data ke-i</p> <p>$x_i = w_i \times z_i$, w_i = penimbang aspek kualitas data ke-i = Diasumsikan bernilai sama (1/4)</p> <p>z_i = Rata-rata skor kepuasan terhadap aspek kualitas data ke-i</p> <p>y = Skala maksimum penilaian</p>
Interpretasi	:	Sesuai Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, interpretasi nilai IKK adalah 25,00-64,99 : Tidak Baik 65,00-76,60 : Kurang Baik 76,61-88,30 : Baik 88,31-100,00 : Sangat Baik
Klasifikasi Penyajian	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-

Lampiran 24. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Menurut Wilayah PST

Wilayah PST BPS	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
JAWA TENGAH	97,22
CILACAP	94,44
BANYUMAS	94,51
PURBALINGGA	95,49
BANJARNEGARA	90,83
KEBUMEN	94,84
PURWOREJO	92,74
WONOSOBO	94,84
MAGELANG	92,96
BOYOLALI	96,67
KLATEN	95,42
SUKOHARJO	91,58
WONOGIRI	95,84
KARANGANYAR	94,02
SRAGEN	94,44
GROBOGAN	92,35
BLORA	92,13
REMBANG	90,24
PATI	87,51
KUDUS	91,56
JEPARA	94,25
DEMAK	93,00
SEMARANG	94,34
TEMANGGUNG	94,33
KENDAL	94,49
BATANG	95,59
PEKALONGAN	89,78
PEMALANG	95,47
TEGAL	94,87
BREBES	95,41
KOTA MAGELANG	90,32
KOTA SURAKARTA	93,39
KOTA SALATIGA	99,84
KOTA SEMARANG	94,18
KOTA PEKALONGAN	96,65
KOTA TEGAL	94,62

Metadata Indikator

Nama Indikator	:	Indeks Persepsi Anti Korupsi Menurut Wilayah PST
Konsep	:	Untuk mengukur penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan PST BPS di Provinsi Jawa Tengah
Definisi	:	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan PST BPS. Indeks ini diperoleh dengan menghitung penimbang yang didapatkan dari empat atribut anti korupsi.
Rumus Penghitungan	:	$IKK = \left(\left(\sum_{i=1}^4 x_i \right) \times 100 \right) / y$ <p>dimana:</p> <p>x_i = Rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i $x_i = w_i \times z_i$, w_i = penimbang atribut anti korupsi ke-i = Rata-rata skor kepentingan atribut anti korupsi ke-i / jumlah rata-rata skor kepentingan z_i = Rata-rata skor kepuasan atribut anti korupsi ke-i y = Skala maksimum penilaian</p>
Interpretasi	:	Dengan menggunakan metode kuartil, nilai IPAK diklasifikasikan menjadi 4 kategori sebagai berikut. 25,00-43,75 : Perilaku anti korupsi sangat tidak diterapkan dalam pelayanan 43,76-62,50 : Perilaku anti korupsi tidak diterapkan dalam pelayanan 62,51-81,25 : Perilaku anti korupsi diterapkan dalam pelayanan 81,26-100,00 : Perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan
Klasifikasi	:	Wilayah Penyedia Data BPS
Penyajian		
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	-

Lampiran 25. Kuesioner VKD20

BARASIA

**SURVEI KEBUTUHAN DATA
TAHUN 2021**

VKD21

1. SP No. 53 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem
 2. Peraturan RI No. 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
 3. Mekanisme BPS No. 38 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SMD & Lembaga BPS

Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)

Pencacah	Nama	Pemeriksa	Nama	Nomer Responden
1. Nama				
2. Tahun lahir	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>			<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
3. E-mail				<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
4. Nomor handphone				<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
5. Jenis kelamin	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>			<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
6. Pendidikan tertinggi yang ditempuh	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>			<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
7. Pekerjaan Utama	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>			<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
8. Nama Instansi/Instansi				<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>

Blok I. Keterangan Responden

0. Kategori Instansi/Instansi
Pilih salah satu jawaban

1. Nama 2. Tahun lahir 3. E-mail 4. Nomor Handphone 5. Jenis kelamin 6. Pendidikan tertinggi yang ditempuh 7. Pekerjaan Utama 8. Nama Instansi/Instansi	1. Lembaga Pendidikan & Penelitian (Dusun Negeri) 2. Lembaga Pendidikan & Penelitian Luar Negeri 3. Kementerian & Lembaga Pemerintah 4. Lembaga Internasional 5. Media Massa 6. Pemusatan Daerah 7. BUMN/BUMD 8. Swasta lainnya Lainnya (.....)
--	---

10. Pemanfaatan ulang hasil pengujian
 dan/atau akan layanin
 PIAH salah satu jawaban

1. Laki-laki Perempuan 2. Tidak 3. Ya 4. Tidak 5. Tidak 6. Tidak 7. Tidak 8. Tidak 9. Tidak 10. Tidak	1. Tugas Sekolah/Tugas Rutin 2. Penunjang 3. Komersial 4. Penelitian 5. Lainnya (.....)
---	---

Pernyataan-pernyataan berikut ini merupakan pada periode 1 Januari 2021 s.d saat pengisian kuesioner

11. Jenis layanan yang digunakan
 Pilih salah satu jawaban

1. Tidak 2. Tidak 3. Tidak 4. Tidak 5. Tidak	1. Persewaan 2. Pembelian Produk BPS 3. Pembelian Data Milen/Pada Wilayah Kerja Statistik 4. Akses produk statistik pada website BPS 5. Komunikasi Statistik 6. Rekomendasi Regulasi Statistik
--	---

12. Fasilitas yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS
 Pilih salah satu jawaban

1. Tidak 2. Tidak 3. Tidak 4. Tidak 5. Tidak 6. Tidak 7. Tidak	1. Daring langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) 2. Aplikasi pelayanan statistik terpadu online (perlu login) 3. Website BPS (bisa go.id) 4. Aplikasi AduLata BPS (berbasis android dan IOS) 5. Lainnya (.....)
--	---

13. Apakah data BPS digunakan sebagai rujukan utama?
 Ya
 Tidak

14. Apakah pernah melakukan penastisian berkali-kali Pelayanan Statistik Terpadu (PST)?
 Ya
 Tidak

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS			
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut? Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			
		Sangat penting /tidak puas	
No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
1	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	Waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. <small>(kontak: kotak surat dan pengaduan, website: sipar://pengaduan.bps.go.id, e-mail: apak@bps.go.id)</small>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11	Diagnosis atau respon cepat melakukan pengaduan BPS 24 berkode 11. Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13	Tidak ada pemertan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	Tidak ada pungutan luar (uang) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	Tidak ada praktik pemrosesan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Blok III. Kebutuhan Data
 Ditisi jika jenis layanan yang digunakan selama rekomendasi statistik (Blok I Bincran 11 berisi salah satu kode 1, 2, 4, R, 10)

Tuliskan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan/dikonsumsi/dikonsumsi/dikonsumsi dari BPS serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut.

No.	Data yang dibutuhkan/dikonsumsi/dikonsumsi			Apakah data pada kolom (2) - (5) sudah diperoleh?		Sumber Data		Tingkat Kepuasan ⁶⁾				
	Jenis data Tuliskan jenis data beserta wilayah datanya Misi/ Sasaran/kegiatan/Proyek/Program/Inisiatif/ Berkaitan dengan Kabupaten Semarang, dll	Tahun Data	Level Data	Periode Data	Ya, sesuai Ya, tidak sesuai Tidak diperoleh Belum diperoleh	Jenis Sumber Data	Judul Sumber Data	Tahun Sumber Data	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
⁶⁾ Kode level data kolom (4) 1. Nasional 2. Provinsi 3. Kabupaten/kota 4. Kecamatan 5. Desa/kelurahan 6. Kelurahan 7. Kecamatan 8. Kabupaten/kota 9. Provinsi 10. Nasional												
⁷⁾ Kode periode data kolom (5) 1. Sepuluh tahunan 2. Lima tahunan 3. Triwulanan 4. Tahunan 5. Semesteran 6. Triwulanan 7. Bulanan 8. Triwulanan 9. Bulanan 10. Triwulanan												
⁸⁾ Definisikan kolom (11) - (13) 11. Sangat baik 12. Baik 13. Buruk												

Blok IV. Catatan
Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS.

<https://jateng.bps.go.id>



Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2020. Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020. Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brandt, R.D. 2000. An 'Outside-In' Approach to Determining Customer-Driven Priorities for Improvement and Innovation. Burke White Paper Series, Vol. 2, Issue 2, pp. 1-8.
- Deng, Jinyang dan Chad D. Pierskalla. 2018. Linking Importance-Performance Analysis, Satisfaction, and Loyalty. A Study of Savannah, GA." Sustainability, ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su10030704.
- Latu, TM & Everett, AM. 2000. Review of Satisfaction Research and measurement Approaches. Science & Research Internal Report 183. New Zealand: Departement of Conservation.
- Martilla, JA, & James, JC. 1977. Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1), 13-17.
- Martinez, CL. 2003. Evaluation Report: Tools Cluster Networking Meeting #1. Arizona: CenterPoint Institute Inc.
- Parasuraman, A. Valerie. 2001. Delivering Quality Service. New York: The Free Press.
- Poliakova, Adela. 2010. Application of the customer satisfaction index (CSI) to transport services. Electronical Technical Journal of Technology, Engineering, and Logistics in Transport, Number IV, Volume V, December 2010. ISSN 1801-674X.
- Samuel, Hatane & Foedjiawati. 2005. Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Kesetiaan Merek (Studi Kasus Restoran The Prime Steak & Ribs Surabaya). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 7, No 1.
- Transportation Research Board. 1999. A Handbook for Measuring Customer Satisfaction and Service Quality. Washington DC: National Academy Press.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jln. Pahlawan, No. 6, Semarang 50241
Telp. 024-8412902, 8412904, 8412905. Fax. 024-8311195
Homepage: <https://jateng.bps.go.id>. E-mail: jateng@bps.go.id

ISBN 978-602-5419-93-5

